



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jawa Timur**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga dapat memberikan kontribusi guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional yang berguna bagi masyarakat. Sehingga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan dan perkembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 30 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR



ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Utama Muda
NIP. 19760417 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Isu Strategis	7
D. Cascading Kinerja	8
E. Peta Proses Bisnis	12
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	47
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	51
BAB IV : PENUTUPAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1. Rekapitulasi Pegawai BPSDM Berdasarkan Gol. Ruang	5
1.2. Rekapitulasi Pegawai BPSDM Berdasarkan Pendidikan.....	6
2.1. Perbandingan Struktur Anggaran	23
3.1. Capaian Kinerja BPSDM Prov. Jatim	38
3.2. Capaian Kinerja Th.2020 dgn Th.2021 BPSDM Prov. Jatim	39
3.3. Capaian Kinerja Akhir Renstra dengan Target Renstra.....	40
3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2021 BPSDM Prov. Jatim	48
3.6. Perbandingan Realisasi Anggaran Th.2020 dgn Th.2021.....	49

DAFTAR GAMBAR

1.1. Struktur Organisasi BPSDM Provinsi Jawa Timur	3
1.2. Cascading Kinerja	11
1.3. Peta Proses Bisnis	15

DAFTAR GRAFIK

1.1. Rekapitulasi Pegawai BPSDM Berdasarkan Gol. Ruang	5
1.2. Rekapitulasi Pegawai BPSDM Berdasarkan Pendidikan	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

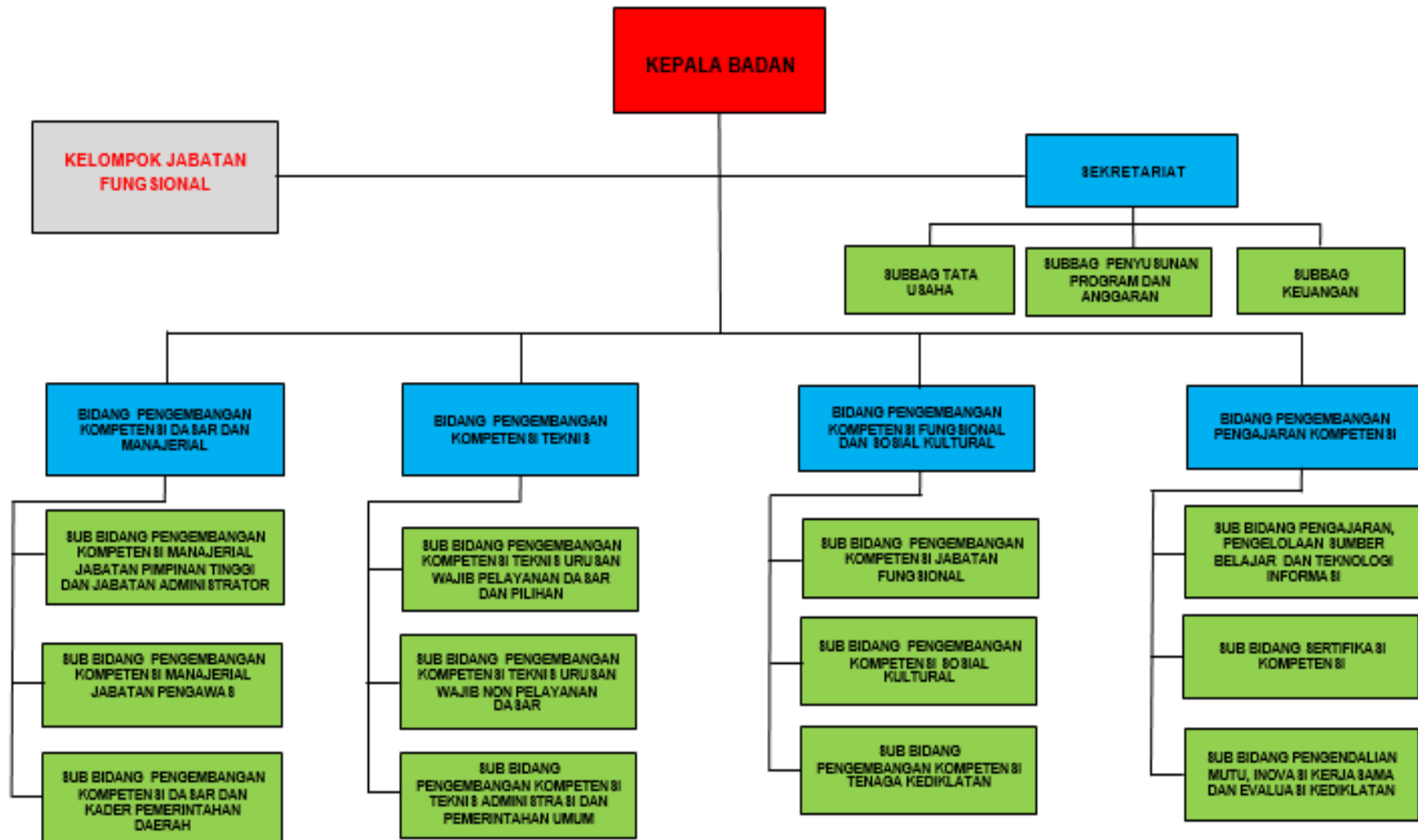
1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
 3. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi membawahi :
 1. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi
 2. Sub Bidang Pengelolaan Pengajaran, Sumber Belajar dan Teknologi Informasi
 3. Sub Bidang Pengendalian Mutu, Inovasi, Kerjasama dan Evaluasi Kediklatan
4. Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Jabatan Pengawas
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader Pemerintahan Daerah
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 3. Sub Bidang Diklat Kompetensi Pemerintahan Umum

6. Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural membawahi :

1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kediklatan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur



B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018 disebutkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan atau pengembangan aparatur sipil negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana.

Adapun jumlah sumber daya manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

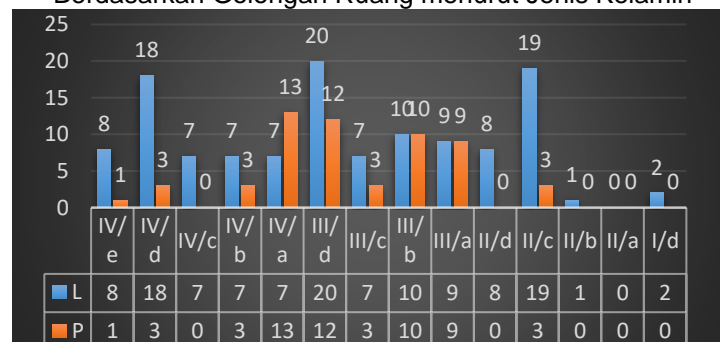
a. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai BPSDM Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Golongan Ruang menurut Jenis Kelamin

NO	GOL. RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV/e	8	1
2	IV/d	18	3
3	IV/c	7	0
4	IV/b	7	3
5	IV/a	7	13
6	III/d	20	12
7	III/c	7	3
8	III/b	10	10
9	III/a	9	9
10	II/d	8	0
11	II/c	19	3
12	II/b	1	0
13	II/a	0	0
14	I/d	2	0
	Total	123	57

Sumber : Data E-Master BPSDM Prov.Jatim, Februari 202

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai BPSDM Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Golongan Ruang menurut Jenis Kelamin



Sumber : Data E-Master BPSDM Prov.Jatim, Januari 2022

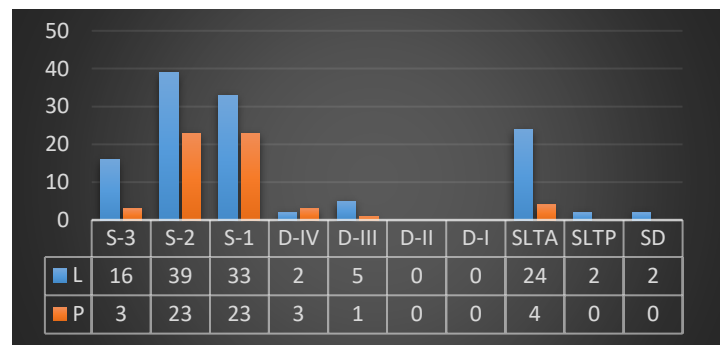
b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai BPSDM Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Pendidikan menurut Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-3	16	3
2	S-2	39	23
3	S-1	33	23
4	D-IV	2	3
5	D-III	5	1
6	D-II	0	0
7	D-I	0	0
8	SLTA	24	4
9	SLTP	2	0
10	SD	2	0
	Total	123	57

Sumber : Data E-Master BPSDM Prov.Jatim, Januari 2022

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai BPSDM Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Pendidikan menurut Jenis Kelamin



Sumber : Data E-Master BPSDM Prov.Jatim, Januari 2022

Pelaksanaan pelatihan dibiayai dengan dana yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur maupun dari Dana Retribusi Layanan Pendidikan untuk penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi kompetensi, analisis kebutuhan diklat dan evaluasi dampak diklat.

Layanan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

1. **Pelatihan Kepemimpinan**, yaitu:
 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
 - Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
2. **Pelatihan Dasar dan Diklat Pra Jabatan**, yaitu:
 - Pelatihan Dasar (Latsar) untuk CPNS
 - Diklat Prajabatan Gol. I dan II K1 / K2
 - Diklat Prajabatan Gol. III K1/K2
3. **Pelatihan Teknis**
4. **Pelatihan Fungsional dan Sosial Kultural**
5. **Sertifikasi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu)**

C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelaksanaan sebuah program dan kegiatan karena dampaknya yang signifikan serta untuk menentukan tujuan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Memaksimalkan penerapan ISO 9001:2015 dalam rangka memenuhi tuntutan akan pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas dan berstandar;
2. Optimalisasi LSP PDN dalam rangka pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi aparatur;
3. Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan baru dalam melaksanakan pelatihan guna mendukung akreditasi pelatihan yang berkelanjutan;
4. Tingkatkan kualitas SDM aparatur dan Widyaiswara dalam menyongsong penerapan Jawa Timur *Corporate University*;

5. Tingkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pengembangan kompetensi guna mendukung pengembangan kompetensi yang modern dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dalam era Revolusi Industri 4.0;
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang dinamis dan transparan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam rangka meningkatkan daya saing;
7. Peningkatan kualitas perencanaan pengembangan kompetensi dalam rangka mengakomodir kebutuhan stakeholder dan menangkap isu yang berkembang dimasyarakat;
8. Pengembangan pelaksanaan program pengembangan kompetensi dalam bentuk kontribusi dan pola kemitraan / fasilitasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari APBD.

D. CASCADING KINERJA

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan target organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Melalui cascading kinerja maka dapat diketahui keterhubungan antara indikator kinerja dengan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disebutkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih periode Tahun 2019-2024 adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”.

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam beberapa misi utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil Negara sehingga Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih periode Tahun 2019-2024 yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur adalah misi ke-3 yakni : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan.

Misi tersebut diatas kemudian diimplementasikan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Jawa Timur melalui penetapan Sasaran yaitu :

Sasaran :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah

Indikator : Indeks profesionalitas ASN

Target : 85,20

Pencapaian Sasaran diatas diukur melalui penetapan Tujuan yang kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional

Indikator : Nilai SAKIP

Target : 81,59

Program Pelaksana : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2. Tujuan : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan

Indikator :

a. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2

b. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2

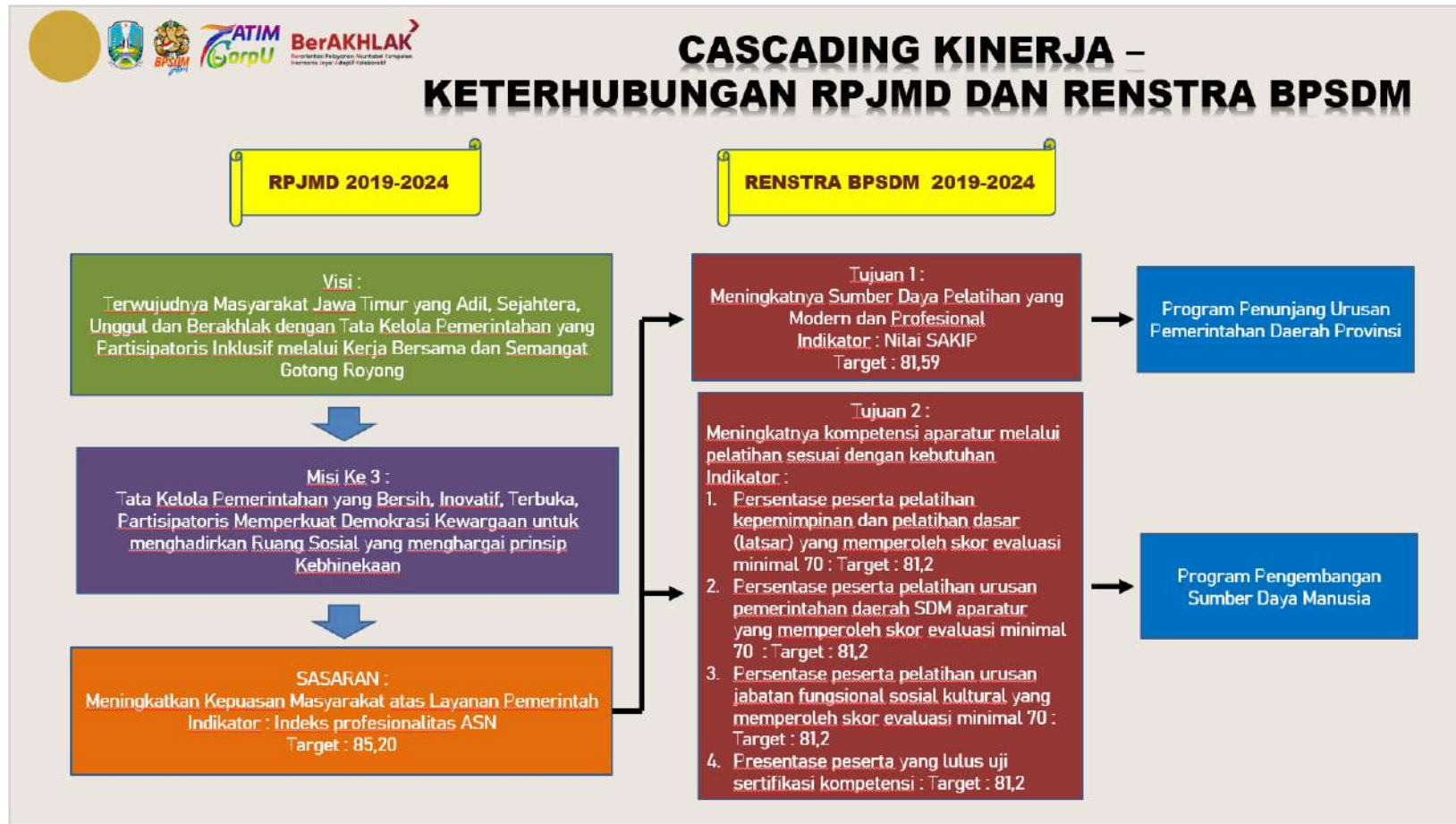
c. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2

d. Presentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi : Target : 81,2

Program Pelaksana : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun cascading kinerja disajikan dalam Gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2
Cascading Kinerja



E. PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis ini merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

1. Dasar Hukum Peta Proses Bisnis

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

- Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 113, Seri E);
 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/354/KPTS/013/2021 tentang Peta Proses Bisnis Provinsi Jawa Timur;

2. Komponen Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis

1. Komponen Proses Bisnis

- **SUPPLIER**
 - LAN RI
 - BPSDM Kemendagri
 - BKD Provinsi
 - BKD/BPSDM Kabupaten/ Kota
 - BKD/BPSDM se Indonesia
 - Lembaga Swasta/Profesional dalam bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia (John Robert Powers, Rumah Perubahan, Markplus Institute, dll)
- **INPUT**
 - SDM
 - Dana
 - Sarana dan Prasarana
 - Fasilitator

- **PROSES**
 - Perencanaan Diklat
 - Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
 - Evaluasi Diklat
- **OUTPUT**
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Laporan AKD
 - Laporan Evaluasi Dampak Diklat
- **CUSTOMER**
 - Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota
 - Pemerintah Pusat (Kementerian / Lembaga)

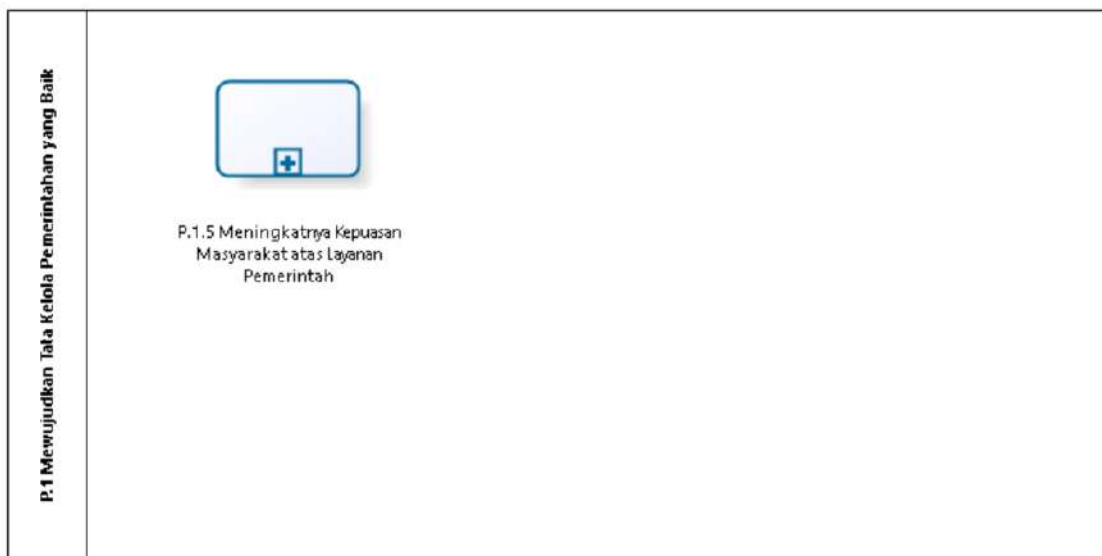
2. Peta Proses Bisnis

Adapun peta proses bisnis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dalam gambar 1.3 berikut ini :

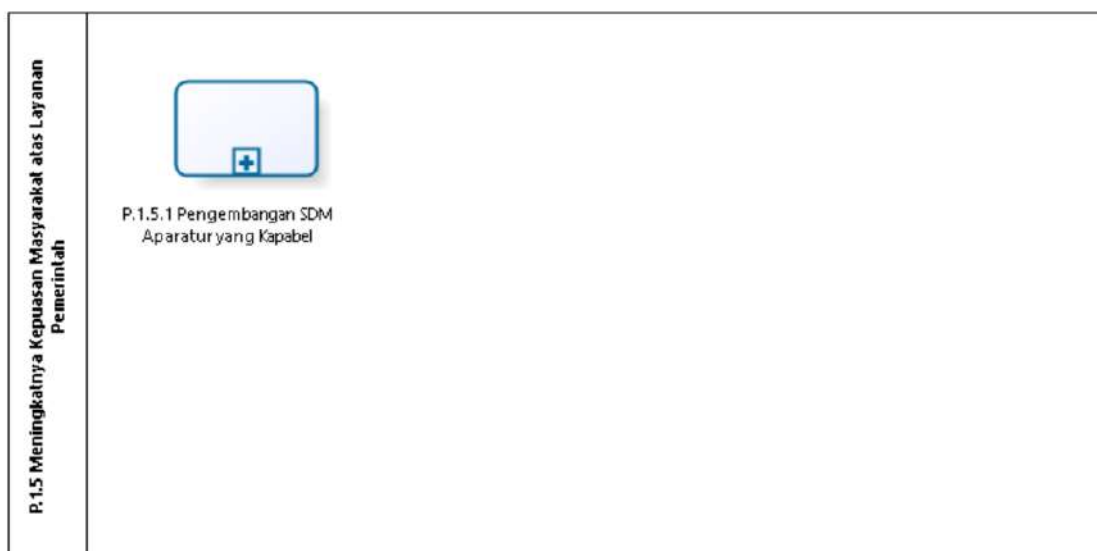
PETA PROSES BISNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis


Level 0




Level 1






Level 2

P.1.5.1 Pengembangan SDM Aparatur yang Kapabel	 <p>P.1.5.1.1 Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN</p>
--	---




Level 3

P.1.5.1.1 Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN	 <p>P.1.5.1.1.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi</p>
--	--

Level 4

P.1.5.1.1.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi		
	<p>P.1.5.1.1.1.1 Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Teknis / Fungsional</p>	<p>P.1.5.1.1.1.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial</p>
		<p>P.1.5.1.1.1.3 Penyelenggaraan Pelatihan Dasar</p>

Level 5

P.1.5.1.1.1 Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Teknis / Fungsional		
	<p>P.1.5.1.1.1.1.1 SOP Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Teknis / Fungsional</p>	<p>P.1.5.1.1.1.1.3 SOP Penyelenggaraan Latsar dan Prajabatan</p>
		<p>P.1.5.1.1.1.1.2 SOP Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan</p>

F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 700/25693/031.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021, bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 82,62 atau predikat A dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
a	Perencanaan Kinerja	30%	26,1	24,83
b	Pengukuran Kinerja	25%	20,63	20,31
c	Pelaporan Kinerja	15%	12,31	12,12
d	Evaluasi Kinerja	10%	7,06	6,85
e	Pencapaian Kinerja	20%	15,5	18,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	81,60	82,62
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Penilaian tersebut diatas menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Adapun uraian secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Secara umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indicator kinerja keseluruhan ASN di semua level. Hal yang perlu

diperhatikan adalah ketercukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya kinerja;

3. Implementasi Akuntabilitas Kinerja sebagai salah satu budaya kinerja masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara merata pada seluruh instansi.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagai upaya keberlanjutan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Perlu dilakukan pemetaan Kembali atas ukuran kinerja yang digunakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan dengan baik output/outcome yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing levelnya;
3. Penyusunan cascading kinerja agar lebih komprehensif terkait bagaimana dampak atas pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian sasaran dan menjaga keselarasan antara IKU sampai dengan IKI serta Menyusun penganggaran berbasis kinerja;
4. Memperkecil kemungkinan deviasi pada pencapaian kinerja, agar memperhatikan keselarasan cascading kinerja dengan peta proses bisnis dan kemungkinan adanya intervensi capaian kinerja dari pihak-pihak terkait;
5. Monitoring dan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja agar dapat dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meminimalisir kesenjangan pemahaman manajemen kinerja;
6. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala untuk mendeteksi lebih awal upaya pencapaian kinerja dan dapat dikembangkan dengan aplikasi;
7. Berupaya untuk menciptakan inovasi perbaikan atas implementasi SAKIP;

8. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan capaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini maka terjadi kesepakatan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

- tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan menganut dokumen anggaran pada tahun bersangkutan dengan memperhatikan penetapan target pada dokumen Renstra maupun Renja pada tahun bersangkutan. Pada Tahun Anggaran 2021, di Pemerintah Provinsi Jawa Timur terjadi refocusing anggaran yang dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga terjadi perubahan anggaran yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan demikian Perjanjian Kinerja Kepala BPSDM Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar (Latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		2. Persentase Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		3. Persentase peserta pelatihan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
2.	Meningkatnya sumberdaya pelatihan yang modern dan profesional	1. Nilai SAKIP	81,59

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 75.320.572.600,- dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 50.093.932.930,- sehingga total pagu anggaran sebesar Rp. 134.414.505.530,- yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
PERBANDINGAN STRUKTUR ANGGARAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program/Kegiatan	MURNI (Rp.)	P-APBD (Rp.)	Berkurang/ Bertambah
PENDAPATAN DAERAH	48.247.480.000	47.889.980.000	357,500,000
BELANJA DAERAH	156.246.477.000	134.414.505.530	21,831,971,470
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	72.678.421.000	59.093.932.930	13,584,488,070
Pengembangan Kompetensi Teknis	5.766.941.000	4.306.859.930	1,460,081,070
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	66.911.480.000	54.787.073.000	12,124,407,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83.568.056.000	75.320.572.600	8,247,483,400
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	980.400.600	774.743.712	205,656,888
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.913.861.588	47.955.217.588	4,958,644,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	233.431.000	112.946.000	120,485,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.489.300.000	1.115.316.000	373,984,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.648.240.000	3.107.559.700	(459,319,700)

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.876.245.000	3.457.145.000	(580,900,000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.879.027.812	11.145.369.600	1,733,658,212
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.547.550.000	7.652.275.000	1,895,275,000

Dengan adanya Perjanjian Kinerja diatas maka ditindaklanjuti dengan penetapan Perjanjian Kinerja pada setiap unit dilingkungan BPSDM Provinsi Jawa Timur dengan perbandingan matriks kinerja sebagai berikut :

1. Sekretariat

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Sekretariat pada awal tahun anggaran 2021 (murni) dan akhir tahun anggaran 2021 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
SEKRETARIAT**

Uraian	Murni Tahun 2021 (Rp.)	P-PAPB Tahun 2021 (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
Anggaran	83.568.056.000,-	75.320.572.600,-
Target indikator kinerja		
Persentase indikator program yang tercapai	100 %	100 %
Persentase realisasi anggaran	90,50 %	85,1 %
Indeks profesionalitas ASN	86,5	81

2. Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial pada awal tahun anggaran 2021 (murni) dan akhir tahun anggaran 2021 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial**

Uraian	Murni Tahun 2021 (Rp.)	P-PAPB Tahun 2021 (Rp.)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Anggaran	60.672.480.000,-	50.118.926.000.,
Target indikator kinerja		
Persentase alumni pelatihan kepemimpinan PNS dan pelatihan dasar CPNS	92%	92%

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada perubahan target alumni pelatihan dengan rincian :

- Pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur dari 2.417 orang menjadi 1.970 orang
- Pembiayaan pola kontribusi dan kemitraan dari 8.990 orang menjadi 10.142 orang.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- o untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- o Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Jawa Timur pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BPKAD Provinsi Jawa Timur).
- o Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari mekanisme pembiayaan retribusi daerah maka dilakukan inventarisasi usulan pengiriman peserta pelatihan dari instansi pengirim. Pada umumnya terjadi penurunan jumlah usulan yang berdampak pada penurunan target PAD BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 secara keseluruhan.

3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada awal tahun anggaran 2021 (murni) dan akhir tahun anggaran 2020 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis**

Uraian	Murni Tahun 2021 (Rp.)	P-PAPB Tahun 2021 (Rp.)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Anggaran	4.475.000.000,-	3.724.065.930.,
Target indikator kinerja		
Persentase alumni pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur	81%	81%

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada perubahan target jumlah alumni pelatihan sebagai berikut :

- Pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur tidak ada perubahan target peserta dari 450 orang tetap menjadi 450 orang.
- Pembiayaan mekanisme retribusi daerah dari 789 Orang berubah menjadi 971 orang.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan pada kegiatan yang belum dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Jawa Timur pada umumnya

langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BPKAD Provinsi Jawa Timur).

- o Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari mekanisme pembiayaan retribusi daerah maka dilakukan inventarisasi usulan pengiriman peserta pelatihan dari instansi pengirim. Pada umumnya terjadi penurunan jumlah usulan yang berdampak pada penurunan target PAD BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 secara keseluruhan.

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural pada awal tahun anggaran 2021 (murni) dan akhir tahun anggaran 2021 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural**

Uraian	Murni Tahun 2021 (Rp.)	P-PAPB Tahun 2021 (Rp.)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Anggaran	3.200.000.000,-	2.318.000.000,-
Target indikator kinerja		
Persentase alumni pelatihan jabatan fungsional dan sosial kultural SDM aparatur	81 %	81 %

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada pengurangan target jumlah alumni pelatihan sebagai berikut :

- Pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur dari 155 orang menjadi 284 orang
- Pembiayaan mekanisme retribusi daerah dari 1200 orang berubah menjadi 280 orang.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan pada kegiatan yang belum dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Jawa Timur pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BPKAD Provinsi Jawa Timur).
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari mekanisme pembiayaan retribusi daerah maka dilakukan inventarisasi usulan pengiriman peserta pelatihan dari instansi pengirim. Pada umumnya terjadi penurunan jumlah usulan yang berdampak pada penurunan target PAD BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 secara keseluruhan.

5. Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi pada awal tahun anggaran 2021 (murni) dan akhir tahun anggaran 2021 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi**

Uraian	Murni Tahun 2021 (Rp.)	P-PAPB Tahun 2021 (Rp.)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Anggaran	3.495.320.000,-	2.932.941.000,-
Target indikator kinerja		
Persentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	100%	100%

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada pengurangan jumlah dokumen manajemen pengajaran dan peserta sertifikasi kompetensi dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk penyusunan dokumen manajemen pengajaran (baik untuk pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur maupun mekanisme retribusi pelayanan Pendidikan) dari awal target sebesar 16 dokumen menjadi 21 dokumen.
- Untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi (baik untuk pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur maupun mekanisme retribusi pelayanan pendidikan) dari awal target sebesar 261 orang turun menjadi 160 orang.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Jawa Timur pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BPKAD Provinsi Jawa Timur).
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari mekanisme pembiayaan retribusi daerah maka dilakukan inventarisasi usulan kegiatan AKD, EDD dan Sertifikasi dari berbagai instansi kediklatan yang masuk. Pada umumnya terjadi penurunan jumlah usulan yang berdampak pada penurunan target PAD BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 secara keseluruhan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, melalui langkah-langkah yakni :

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
- Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2021)**

Adapun hasil capaian kinerja dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur :

1) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS

Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang dibutuhkan. Adapun realisasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai berikut :

NO	JENIS DIKLAT	TARGET (Orang)	REALISASI		
			L	P	TOTAL
I.	Program Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS				
	APBD				
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	40	30	10	40
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	80	57	23	80
3	Pelatihan Dasar CPNS	1.850	730	1.114	1.844
	PAD (Kontribusi Pelayanan Pendidikan)				
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	120	102	13	115
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	160	118	42	160
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	120	69	46	115
4	Pelatihan Dasar CPNS	5.890	1.904	3.983	5.887
	PAD (Pola Kemitraan)				
1	Pelatihan Kepemimpinan	450	337	108	445

	Administrator				
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	262	123	139	262
3	Pelatihan Dasar CPNS	3200	1031	2184	3197

2) Penyelenggaraan Pelatihan Teknis

Pelatihan Kompetensi Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Adapun realisasi Pelatihan Kompetensi Teknis sebagai berikut :

NO	JENIS DIKLAT	TARGET PESERTA	REALISASI		
			L	P	TOTAL
	APBD				
1	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kepala Desa Angkatan I	60	56	3	59
2	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kepala Desa Angkatan II	60	55	4	59
3	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kepala Desa Angkatan III	60	56	4	60
4	Diklat Keprotokolan dan MC	30	4	26	30
5	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	30	28	2	30
6	Diklat Perubahan Mindset dan Pengembangan Kepribadian Pelayanan (In House Training) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya	30	10	20	30
7	Diklat Perubahan Mindset dan Pengembangan Kepribadian Pelayanan (In House Training) di RSU Haji Surabaya	30	18	12	30
8	Diklat Perubahan Mindset dan Pengembangan Kepribadian Pelayanan (In House Training) di RSU Menur Surabaya	30	15	15	30

9	Diklat Peningkatan Kapasitas Pengelola Kediklatan	30	18	12	30
10	Diklat Pengembangan Desa Wisata	30	22	8	30
11	Diklat Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Produk Makanan dan Minuman Ringan	30	17	13	30
12	Diklat Tata Kelola Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	30	27	3	30
	TOTAL (APBD)	450	326	122	448

NO	JENIS DIKLAT	TARGET PESERTA	REALISASI		
			L	P	TOTAL
	PAD				
1	Diklat Konvensi Hak Anak Bidang Gugus Tugas Kota Surabaya	45	36	9	45
2	Diklat Konvensi Hak Anak Bidang Kesehatan Kota Surabaya	45	41	4	45
3	Diklat dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Blitar	40	20	20	40
4	Diklat Operasional Pemeliharaan Sumber Daya Air Bagi Aparatur Pemerintah Kab. Banyuwangi	40	37	3	40
5	Diklat Fasilitator Gender Angkatan I Kota Surabaya	36	19	17	36
6	Diklat Fasilitator Gender Angkatan II Kota Surabaya	36	13	23	36
7	Diklat Penanggulangan Penyakit Menular	25	3	22	25
8	Diklat Pelayanan Publik Kabupaten Jombang	40	18	22	40
9	Diklat dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Blitar	40	23	17	40
10	Diklat Peningkatan Kapasitas ASN Kelurahan Kota Madiun	30	17	13	30
11	Diklat Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bondowoso	30	18	12	30

12	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Malang Angkatan I	40	18	22	40
13	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Mojokerto Angkatan I	40	30	10	40
14	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Mojokerto	40	22	18	40
15	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Malang Angkatan II	40	19	21	40
16	Diklat Anjab dan ABK Pemerintah Kabupaten Bondowoso	30	10	20	30
17	Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Probolinggo	34	15	19	34
18	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo	60	34	26	60
TOTAL (PAD)		691	393	298	691
TOTAL (APBD DAN PAD)		1.141	719	420	1.139

3) Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan Sosial Kultural

Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing serta dalam rangka meningkatkan Kompetensi Tenaga Kediklatan serta peningkatan kompetensi Sosial Kultural.

Adapun realisasi Pelatihan Fungsional dan Sosial Kultural sebagai berikut :

NO	JENIS DIKLAT	TARGET PESERTA	REALISASI		
			L	P	TOTAL
	APBD				
1	Rapat Koordinasi Teknis Jabatan Fungsional Satpol PP	76	55	21	76
2	Rapat Inventarisasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	110	66	44	110
3	Diklat Dasar Satpol PP	30	26	4	30
4	Diklat Pengawas Bibit Ternak	30	15	14	29
5	Diklat Handling Obat	30	4	26	30
6	Diklat Distric Food Inspector (DFI)	38	7	19	26
TOTAL		314	173	128	301
	PAD (Pola Kemitraan)				
1	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian	40	20	20	40
2	Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	40	22	17	39
3	Diklat Budaya Kerja	50	22	28	50
4	Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	40	14	26	40
5	Diklat Service Excellent	30	9	21	30
6	Diklat Pelayanan Publik Bagi ASN	40	24	16	40
7	Diklat Kinerja dan Kedisiplinan PNS	40	24	16	40
TOTAL		280	135	144	279

Berdasarkan hasil capaian penyelenggaraan pelatihan di atas, maka realisasi dan capaian kinerja TA. 2021 berdasarkan indikator kinerja pada

tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional	Nilai SAKIP	81.59	82,62	101,26
Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	100 %	123,30
	2. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	90,83 %	112,00
	3. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	100 %	123,30
	4. Presentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi	81,1 %	100 %	110,89
			Rerata	114,15

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Adapun rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 berdasarkan indikator kinerja pada sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
BPSDM Provinsi Jawa Timur

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Indeks Profesionalitas ASN	85,1 %	85 %	85,1 %
Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional	Nilai SAKIP	81.59	81,60	82,62
Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	99,99 %	100 %
	2. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	100 %	90,83 %
	3. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	100 %	100 %
	4. Persentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi	81,1	-	89,93 %

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Adapun rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan target akhir pada Renstra serta tingkat kemajuan berdasarkan indikator kinerja pada sasaran strategis

sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Akhir RENSTRA dengan Target RENSTRA

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (2021)	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atau Layanan Pemerintah	Indeks Profesionalitas ASN	85,1 %	85,1 %	101,26 %
	Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional	Nilai SAKIP	81.59	82,62	123,30 %
	Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	100 %	112,00 %
		2. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	90,83 %	123,30 %
		3. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	100 %	110,89 %
4. Persentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi		81,1 %	89,93 %	101,26 %	

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada)

Tidak adanya standar nasional untuk penetapan target kinerja dibidang pengembangan kompetensi sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur tidak

memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan baik itu dengan instansi baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengembangan kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan diklat aparatur yang dalam pelaksanaannya mencakup aspek program, SDM dan sarana prasarana.

Secara umum, pelaksanaan program kegiatan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah sampai dengan 31 Desember tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan capaian pada kedua sasaran strategis yaitu **Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan** dan **Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional** didapatkan capaian kinerja tahun 2021 rerata sebesar **114,15 %**.

Untuk realisasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021 sebesar Rp. 109988461036.97 dari pagu P-APBD 2021 sebesar Rp. 134.414.505.530,00 atau 81,83 %.

Dari hasil tersebut secara umum untuk penyerapan anggaran belum optimal dengan analisis serapan sebagai berikut :

1. Analisis serapan belanja daerah

Dari target realisasi belanja sebesar 85,1% didapatkan realisasi belanja sebesar 81,83% atau capaian sebesar 96,15%. Hal ini disebabkan Perubahan pola diklat (klasikal ke daring) dan pemberlakuan PPKM menyebabkan sebagian

alokasi anggaran belanja pelaksanaan pelatihan tidak terserap secara maksimal antara lain belanja makanan minuman kegiatan/pelatihan, perjalanan dinas, honorarium narasumber dan obat-obatan)

Adapun solusi yang dilakukan yaitu :

- a. Dengan mendesain kembali perencanaan penganggaran pelatihan sesuai dengan kondisi perkembangan pandemic
- b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi agar lebih mampu menjawab tuntutan perubahan dan tetap mempertahankan serta meningkatkan daya saing yang telah dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu institusi / lembaga yang telah diakui keberadaannya secara nasional dalam pengembangan bidang kompetensi aparatur.

2. Analisis realisasi target PAD

Untuk realisasi target PAD sebesar 87,33% yang mana hal ini sangat dipengaruhi kemampuan instansi pengirim yang pada umumnya terkena refocusing anggaran.

Adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi usulan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Kab/Kota secara periodik serta melakukan koordinasi secara intensif dengan institusi terkait mengenai kebutuhan diklat sesuai substansi (kompetensi) yang dibutuhkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya hal yang diukur yaitu :

- **Alokasi Berdasarkan Sasaran Pembangunan**

Berdasarkan alokasi sasaran pembangunan pada Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional”, alokasi anggaran sebesar Rp. 75.320.572.600,- dan “Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan” alokasi anggaran sebesar Rp. 59.093.932.930,- dari total anggaran sebesar Rp. 134.414.505.530,- atau sebesar 43,96 %.

- **Pencapaian Kinerja Dan Anggaran**

Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan anggaran dikalikan 100%. Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2021 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Sasaran yakni **“Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional dan Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan”** yang di bagi menjadi 2 (dua) program yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 75.320.572.600,- realisasi Rp. 70.740.073.632,97,- dengan capaian kinerja 93.92% ;
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran Rp. 59.093.932.930,- realisasi Rp. 39.248.387.404,- dengan capaian 66,42%.

Dari capaian kerja tersebut didapatkan rerata sebesar 80,69 %.

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diukur berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan	
% Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran	
% Penyerapan Anggaran	X 100%

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran / Program	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Persentase indikator program yang tercapai	100,00	94,82	5,46
	2. Persentase realisasi anggaran	96,82		2,11
	3. Indeks profesionalitas ASN	100,00		5,46
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	105,49	66,56	58,49
	2. Prosentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	115,94		74,19
	3. Prosentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	113,22		70,10
	4. Prosentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	100,00		50,24
RERATA		104,4	80,69	29,65

Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap program dan indikatornya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 3 indikatornya yaitu Persentase indikator program yang tercapai, Persentase realisasi anggaran, dan Indeks

profesionalitas ASN yaitu sebesar 5,46 %, 2,11 % dan 5,46%.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 4 indikatornya yaitu Persentase alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS, Prosentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur, Prosentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur, dan Prosentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun yaitu sebesar 58,49 %, 74,19 %, 70,10 % dan 50,24 %.

Secara umum sasaran strategis **Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan Meningkatkan Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional** dengan capaian kinerja sebesar 104,4 % dan capaian anggaran sebesar 80,69 % maka yang dicapai efisiensinya sebesar 29,65 %. Adanya efisiensi ini ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Hasil analisis keberhasilan pencapaian kinerja pada tiap program-program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi capaian anggaran sebesar Rp. 70.740.073.632.97,- atau 93,92% dengan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan	Plafon	Realisasi	%
Perencanaan, Penganggaran, dan	774.743.712,00	726.960.689,00	93,83

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.955.217.588,00	45.435.823.510,00	94,75
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	112.946.000,00	110.330.980,00	97,68
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.115.316.000,00	1.067.069.059,00	95,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.107.559.700,00	2.978.389.821,00	95,84
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.457.145.000,00	3.382.305.671,40	97,84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.145.369.600,00	10.002.057.307,00	89,74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.880.000,00	1.832.000,00	63,61

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah upaya dari seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen dan berkewajiban untuk selalu menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Jawa Timur sesuai kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA).

- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia capaian anggaran sebesar Rp. 39.248.387.404,- atau 66,42% dengan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan	Plafon	Realisasi	%
Pengembangan Kompetensi Teknis	4.306.859.930,00	3.851.683.329,00	89,43
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	54.787.073.000,00	35.396.704.075,00	64,61

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini khususnya pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional kurang menunjang keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan.

Belum optimalnya dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia disebabkan sebagian besar karena adanya COVID 19 sehingga setiap kegiatan dan program yang telah direncanakan mengalami banyak kendala terkait dengan di terapkannya PSBB/PPKM dan perketatan penerapan protokol Kesehatan. Selain itu beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur yang rencananya mengirimkan peserta diklat kepemimpinan maupun diklat prajabatan/latsar tidak jadi mengirimkan dikarenakan terbatasnya anggaran akibat refocusing anggaran yang di gunakan untuk penanganan dan pengendalian virus corona atau COVID 19.

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2019-2024 yang mana pada tahun ini BPSDM Provinsi sebesar Rp. 134.414.505.530,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 75.320.572.600,-

(Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 59.093.932.930,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Adapun Penyerapan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.5
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR

Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	59,093,932,930.00	39,248,387,404.00	66.42
Pengembangan Kompetensi Teknis	4,306,859,930.00	3,851,683,329.00	89.43
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	54,787,073,000.00	35,396,704,075.00	64.61
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75,320,572,600.00	70,740,073,632.97	93.92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	774,743,712.00	726,960,689.00	93.83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47,955,217,588.00	45,435,823,510.00	94.75
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	112,946,000.00	110,330,980.00	97.68
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,115,316,000.00	1,067,069,059.00	95.67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,107,559,700.00	2,978,389,821.00	95.84
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,457,145,000.00	3,382,305,671.40	97.84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,145,369,600.00	10,002,057,307.00	89.74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,880,000.00	1,832,000.00	63.61
TOTAL BELANJA	134,414,505,530.00	109,988,461,036.97	81.83

Tabel 3.6
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021
BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2020

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan/uji sertifikasi sesuai dengan kebutuhan							
Program Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	Persentase Alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	91%	100%	109,89%	19.970.400.000,-	13.086.981.419,-	65,53
Program Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	Persentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	80,5%	100%	124,22%	8.293.351.000,-	7.926.072.240,-	95,57
Program Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	Persentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	80,5%	100%	124,22%	1.451.358.480,-	1.180.734.276,-	81,35
Program Manajemen Pengajaran dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	100%	100%	100%	1.246.652.000,-	1.102.201.950,-	88,41
Sasaran 2 :Meningkatnya sumberdaya pelatihan yang modern dan profesional							
Program Pelayanan Kesekretariatan	1. Persentase indikator program	100 %	100%	100%	450.000.000,-	439.626.041,-	97,69
	2. Persentase realisasi anggaran	90 %	90,24%	100,26%	3.528.000.000,-	3.477.283.357,-	98,56
	3. Indeks profesionalitas ASN	86,5%	00%	00%	30.465.074.797,-	28.118.298.182,81,-	92,30

TAHUN 2021

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Persentase indikator program yang tercapai	100	100	100,00	75.320.572.600,-	71.416.645.486,-	94,82
	2. Persentase realisasi anggaran	85,1	82,39	96,82			
	3. Indeks profesionalitas ASN	81	81	100,00			
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	92	97,16	105,49	59.093.932.930,-	39.333.353.852,-	66,56
	2. Prosentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	81,10	94,03	115,94			
	3. Prosentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	81,10	91,82	113,22			
	4. Prosentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	100	100,00	100,00			

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Salah satu upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah dengan mempedomani hasil rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya keberlanjutan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi ke Bidang-Bidang maupun Sub Bagian di Sekretariat terkait pelaksanaan manajemen kinerja pada unit kerja bersangkutan;
2. Perlu dilakukan pemetaan Kembali atas ukuran kinerja yang digunakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan dengan output / outcome yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing levelnya yang mana hal ini dilakukan dengan melakukan proses cek and re-check dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sehingga didapatkan kesepakatan terhadap penetapan kinerja yang dilakukan;
3. Penyusunan cascading kinerja agar lebih komprehensif terkait bagaimana dampak atas pelaksanaan program / kegiatan terhadap capaian sasaran dan menjaga keselarasan antara IKU sampai dengan IKI serta Menyusun penganggaran berbasis kinerja yang mana hal ini dilakukan dengan mereview pelaksanaan penyusunan cascading kinerja dengan mengakomodir kebutuhan yang timbul dilapangan;
4. Memperkecil kemungkinan deviasi pada pencapaian kinerja, agar memperhatikan keselarasan cascading kinerja dengan peta proses bisnis dan kemungkinan adanya intervensi capaian kinerja dari

pihak-pihak terkait yang mana hal ini ditindaklanjuti dengan mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap data capaian kinerja baik diberikan oleh Bidang maupun Sekretariat sehingga apabila ditemukan deviasi dapat segera direvisi;

5. Monitoring dan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja agar dapat dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meminimalisir kesenjangan pemahaman manajemen kinerja yang mana hal ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan baik dalam bentuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi maupun melalui grup *WhatsApp* sehingga koordinasi dapat terus dilakukan;
6. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala untuk mendeteksi lebih awal upaya pencapaian kinerja dan dapat dikembangkan dengan aplikasi yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan pembuatan aplikasi DIMPLE (*Digital Management of Performance Planning and Evaluation*) yang mulai diterapkan implementasinya sejak triwulan IV Tahun 2021;
7. Berupaya untuk menciptakan inovasi perbaikan atas implementasi SAKIP yang mana hal ini dilakukan dengan mendorong tiap Unit Kerja dilingkungan BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk menciptakan inovasi sesuai bidang tugas yang dimiliki;
8. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan memasukkan agenda implementasi SAKIP dalam pelaksanaan rapat khususnya dilingkungan pejabat struktural BPSDM Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang mengacu pada dokumen Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dan alokasi sumber daya keuangan (anggaran) yang digunakan. Kontrak Kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan atau pengembangan aparatur sipil negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adanya pandemi yang melanda telah memaksa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya pengembangan kompetensi aparatur. Untuk itu BPSDM Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan metode yang sesuai dengan perubahan situasi yang ada. Hal ini diwujudkan dalam bentuk diversifikasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yaitu dalam bentuk klasikal, non klasikal maupun blended. Output dari penerapan ini adalah tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja khususnya yang dibiayai sepenuhnya oleh APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk kegiatan yang dibiayai oleh mekanisme Retribusi Pelayanan Pendidikan pada umumnya belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan berkurangnya anggaran pengiriman peserta dari instansi pengirim dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan covid.

Secara umum pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Tahun 2021 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Hal ini terbukti dengan capaian kinerja dalam Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2021 yang menyebutkan rerata capaian kinerja sebesar 104,4 % dan realisasi anggaran sebesar 81,83 %. Keberhasilan merealisasikan target

kinerja merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur untuk terus menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan perubahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas yang memiliki kompetensi, dedikasi dan integritas yang tinggi untuk keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Jawa Timur.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

1. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis pelatihan baru, kurikulum yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek;
3. Meningkatkan kompetensi SDM Kediklatan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
4. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarannya;
5. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan;
6. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/kota serta;
7. Mengembangkan *Corporate University (Corpu)* untuk pelatihan Non

Klasikal Aparatur Sipil Negara;

8. Mengembangkan proses pembelajaran berbasis IT untuk mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
9. Membuka jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kapasitas lembaga baik dengan Lembaga Pemerintah ataupun swasta dalam seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**FORM
PENDANAAN
INDIKATIF**

NAWA BHAkti	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	718.140.100	463.160.270	472.921.079	504.092.422
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.832.000	21.175.631	21.621.894	23.047.044
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.735.000	21.186.257	21.632.744	23.058.609
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34.152.500	21.945.387	22.407.872	23.884.828
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	49.230.500	30.771.796	31.420.292	33.491.278
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.864.000	17.416.547	17.783.590	18.955.748
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.433.000	37.148.925	37.931.815	40.431.991
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.997.656.000	52.678.855.950	53.789.029.437	57.334.391.129
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.252.199.676	1.292.093.634	1.319.323.689	1.406.283.422	

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.272.000	132.816.799	135.615.829	144.554.588
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	230.131.000	143.844.654	146.876.088	156.557.038
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44.251.000	24.096.516	24.604.334	26.226.064
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	56.160.000	33.834.256	34.547.291	36.824.385
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	62.452.000	71.999.521	73.516.865	78.362.535
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.739.912	9.287.700	9.483.432	10.108.508	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.811.000	6.988.746	7.136.029	7.606.382
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.730.000	16.045.800	16.383.956	17.463.861
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	42.372.000	54.007.923	55.146.106	58.780.915
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18.821.000	30.597.093	31.241.907	33.301.135
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.810.000	6.988.746	7.136.029	7.606.382
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.281.000	16.439.585	16.786.039	17.892.447

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	11.681.000	14.839.443	15.152.175	16.150.891
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20.000.000	12.501.111	12.764.564	13.605.906
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	337.005.000	43.753.887	44.675.972	47.620.671
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.851.000	42.641.913	43.540.564	46.410.426
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	51.283.000	55.608.065	56.779.970	60.522.471
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.531.000	11.039.106	11.271.748	12.014.695
				Pemindahan Tugas ASN	16.886.000	13.870.607	14.162.921	15.096.433
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.082.950.000	715.957.353	731.045.700	779.230.645
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28.416.000	17.761.578	18.135.892	19.331.271
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.416.000	17.761.578	18.135.892	19.331.271
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	197.195.000	96.932.263	99.396.536
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		70.115.000	45.297.774	46.252.396	49.301.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		234.170.000	146.369.253	149.453.892	159.304.750
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		574.795.000	351.578.108	358.987.393	382.649.099
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		140.413.212	90.194.326	92.830.288	98.948.951

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.640.000	75.406.699	76.995.847	82.070.825
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	20.918.000	21.914.000	22.910.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis	-	216.820.000	216.820.000	216.820.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	536.400.000	325.903.952	332.772.171	354.705.969
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	636.680.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	932.835.000	543.503.375	547.656.743	580.285.672
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	605.480.000	310.327.568	316.867.525	337.753.010
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	968.689.000	1.014.817.000	1.060.945.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	968.689.000	1.014.817.000	1.060.945.000
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	92.500.000	101.750.000	111.925.000
				Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	454.800.000	284.275.254	290.266.175	309.398.302
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	760.210.000	567.206.638	579.160.159	617.333.970
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.080.000	14.176.259	14.475.015
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.586.500.000	2.852.407.904	2.912.520.592	3.104.491.688

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	436.000.000	241.271.434	246.356.076	262.593.986
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.926.540.600	4.942.251.925	5.046.406.750	5.379.027.312
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.000.000	185.016.436	188.915.540	201.367.409
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.400.000	116.135.317	118.582.795	126.398.867
				Pemeliharaan Mebel	87.500.000	67.193.469	68.609.529	73.131.745
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	85.400.000	93.940.000	103.334.000
				Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	957.150.000	382.860.348	384.188.638	406.309.224
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.548.800.000	2.561.790.079	2.615.778.181	2.788.190.285
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.556.400.000	1.440.878.002	1.471.243.592	1.568.216.725
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.960.200.000	1.128.475.249	1.152.257.150	1.228.205.134

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	20.000.000	12.501.111	12.764.564	13.605.906
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	121.500.000	75.631.719	77.225.609	82.315.731
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	32.550.000.000	3.065.897.362	3.130.509.205	3.336.848.444

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	715.500.000	450.628.157	460.124.860	490.452.774
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	119.500.000	108.549.643	110.837.258	118.142.803
				Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	141.100.000	88.132.829	89.990.173	95.921.637
				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	843.500.000	522.546.421	533.558.755	568.726.870
				Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1.000.500.000	628.805.861	642.057.545	684.377.071

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	455.000.000	284.400.265	290.393.820	309.534.361
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	133.700.000	75.631.719	77.225.609	82.315.731
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	61.890.500.000	39.179.928.092	40.005.620.227	42.642.484.939
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.450.400.000	935.395.597	955.108.466	1.018.061.916

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021 (MURNI)**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIES AGUNG PAEWAI**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR



[Handwritten signature]
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

ARIES AGUNG PAEWAI

Pembina Tingkat I

NIP. 19760417 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar (Latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		2. Persentase Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		3. Persentase peserta pelatihan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
2.	Meningkatnya sumberdaya pelatihan yang modern dan profesional	1. Nilai SAKIP	81,59

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 83.568.056.000,-	APBD
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 72.678.421.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 156.246.477.000,-	

Surabaya, Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR



[Handwritten Signature]
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

[Handwritten Signature]

ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Tingkat I
NIP. 19760417 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021 (P-APBD)**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIES AGUNG PAEWAI**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Oktober 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**


ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Utama Muda
NIP. 19760417 199511 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar (Latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		2. Persentase Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		3. Persentase peserta pelatihan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
2.	Meningkatnya sumberdaya pelatihan yang modern dan profesional	1. Nilai SAKIP	81,59

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 75.320.572.600,-	APBD
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 50.093.932.930,-	APBD & PAD
Jumlah	Rp. 134.414.505.530,-	

Surabaya, Oktober 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR


KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA**


ARIES AGUNG PAEWAI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760417 199511 1 001

REKAPITULASI DATA

REKAPUTULASI ALUMNI KEGIATAN TAHUN 2021

BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET PESERTA	ALUMNI	%
PEMBIAYAAN APBD PROVINSI JAWA TIMUR				
1	Pelatihan Kepemimpinan	120	120	100.00
2	Pelatihan Dasar	1.850	1.844	99.68
3	Pelatihan Kompetensi Teknis	450	448	99.56
4	Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	314	301	95.86
5	Sertifikasi Kompetensi	130	105	80.77
PEMBIAYAAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN				
1	Pelatihan Kepemimpinan	1.112	1.097	98.65
2	Pelatihan Dasar	9.090	9.084	99.93
3	Pelatihan Kompetensi Teknis	691	691	100.00
4	Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	280	279	99.64
5	Sertifikasi Kompetensi	30	29	100.00

CAPAIAN PRESTASI KELEMBAGAAN TAHUN 2021**BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	URAIAN PRESTASI	PENYELENGGARA
1	Peringkat 1 Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2021 oleh LAN – RI	Lembaga Administrasi Negara
2	Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi Bintang 1 dan Terakreditasi “A” (Program)	Lembaga Administrasi Negara
3	Akreditasi “A” sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat Barang/Jasa	LKPP
4	Juara III Nasional sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat Manajemen Bencana	
5	Re Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015	
6	Predikat “A” (Memuaskan) untuk hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021	
7	Penghargaan PWI Awards Tahun 2021 sebagai lembaga penanganan Covid-19 (diluar dari tupoksi)	
8	KTI International Widyaiswara Terindex SCOPUS dan Web Scince 2020-2021	
9	Peringkat I Terbaik, Inovasi Pengembangan Micro Learning LAN RI Th. 2021	
10	TOP 30, KOVABLIK Tahun 2021, Aplikasi PAWON (Pelayanan Administrasi Widyaiswara Online)	

CASCADING KINERJA

CASCADING KINERJA – KETERHUBUNGAN RPJMD DAN RENSTRA BPSDM

RPJMD 2019-2024

RENSTRA BPSDM 2019-2024

Visi :
Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong

Tujuan 1 :
Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional
Indikator : Nilai SAKIP
Target : 81,59

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Misi Ke 3 :
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan

Tujuan 2 :
Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan
Indikator :

1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2
2. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2
3. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2
4. Presentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi : Target : 81,2

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

SASARAN :
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah
Indikator : Indeks profesionalitas ASN
Target : 85,20

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Isu Strategis	7
D. Cascading Kinerja	8
E. Peta Proses Bisnis	12
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	47
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	51
BAB IV : PENUTUPAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1. Rekapitulasi Pegawai BPSDM Berdasarkan Gol. Ruang	5
1.2. Rekapitulasi Pegawai BPSDM Berdasarkan Pendidikan.....	6
2.1. Perbandingan Struktur Anggaran	23
3.1. Capaian Kinerja BPSDM Prov. Jatim	38
3.2. Capaian Kinerja Th.2020 dgn Th.2021 BPSDM Prov. Jatim	39
3.3. Capaian Kinerja Akhir Renstra dengan Target Renstra.....	40
3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2021 BPSDM Prov. Jatim	48
3.6. Perbandingan Realisasi Anggaran Th.2020 dgn Th.2021.....	49

DAFTAR GAMBAR

1.1. Struktur Organisasi BPSDM Provinsi Jawa Timur	3
1.2. Cascading Kinerja	11
1.3. Peta Proses Bisnis	15

DAFTAR GRAFIK

1.1. Rekapitulasi Pegawai BPSDM Berdasarkan Gol. Ruang	5
1.2. Rekapitulasi Pegawai BPSDM Berdasarkan Pendidikan	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

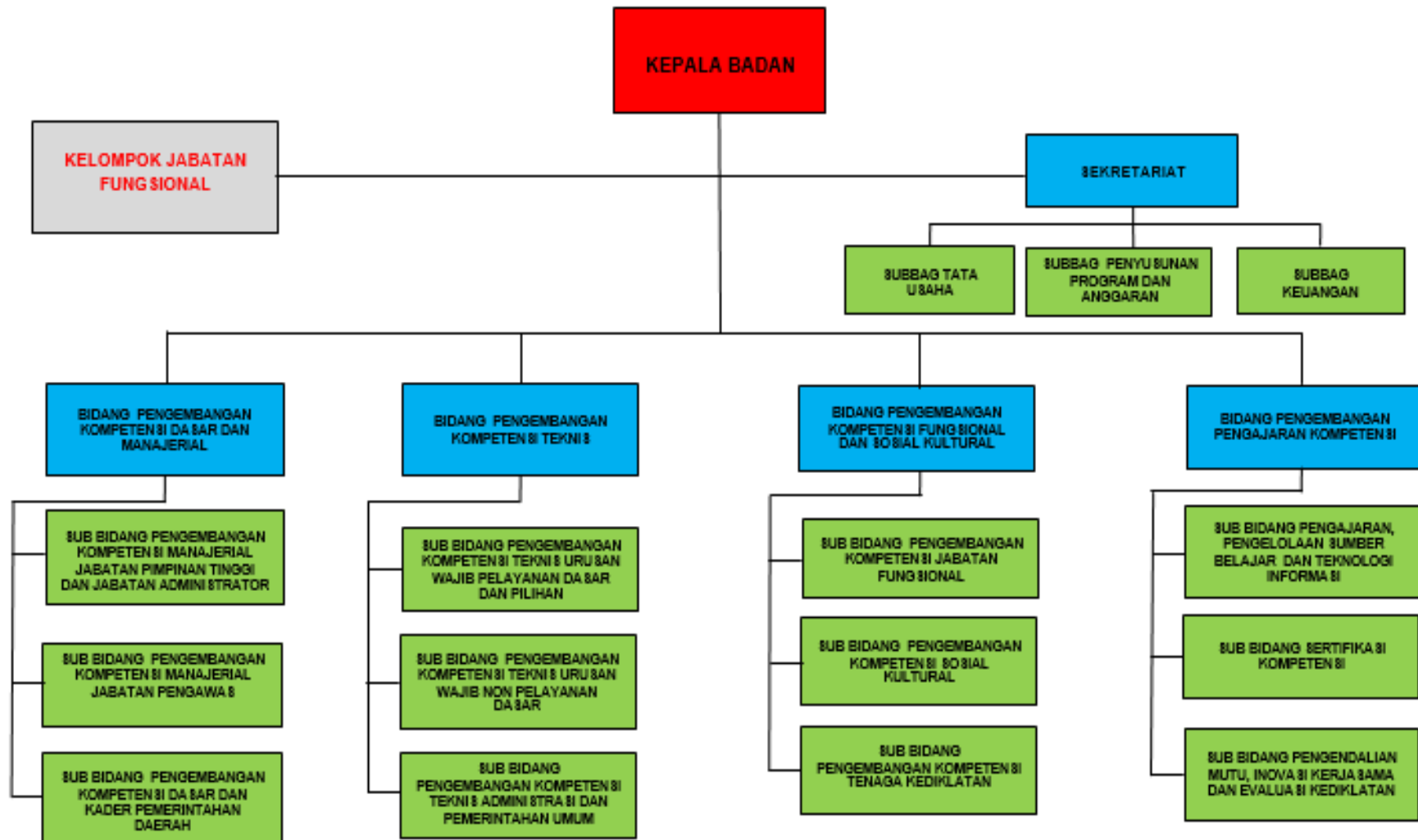
1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
 3. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi membawahi :
 1. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi
 2. Sub Bidang Pengelolaan Pengajaran, Sumber Belajar dan Teknologi Informasi
 3. Sub Bidang Pengendalian Mutu, Inovasi, Kerjasama dan Evaluasi Kediklatan
4. Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Jabatan Pengawas
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader Pemerintahan Daerah
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 3. Sub Bidang Diklat Kompetensi Pemerintahan Umum

6. Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural membawahi :

1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kediklatan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur



B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018 disebutkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan atau pengembangan aparatur sipil negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana.

Adapun jumlah sumber daya manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

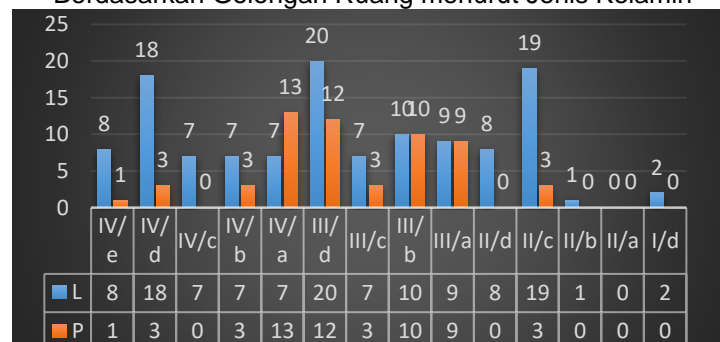
a. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai BPSDM Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Golongan Ruang menurut Jenis Kelamin

NO	GOL. RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV/e	8	1
2	IV/d	18	3
3	IV/c	7	0
4	IV/b	7	3
5	IV/a	7	13
6	III/d	20	12
7	III/c	7	3
8	III/b	10	10
9	III/a	9	9
10	II/d	8	0
11	II/c	19	3
12	II/b	1	0
13	II/a	0	0
14	I/d	2	0
	Total	123	57

Sumber : Data E-Master BPSDM Prov.Jatim, Februari 202

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai BPSDM Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Golongan Ruang menurut Jenis Kelamin



Sumber : Data E-Master BPSDM Prov.Jatim, Januari 2022

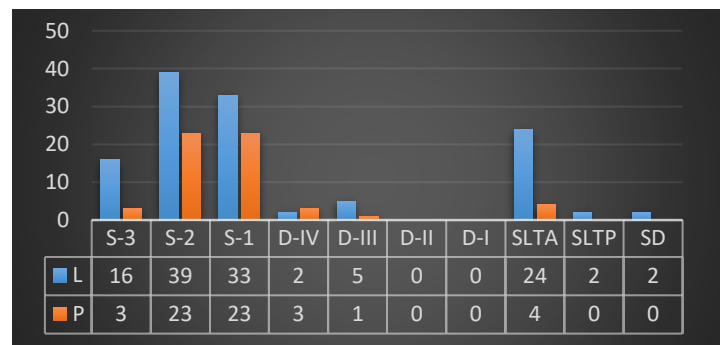
b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai BPSDM Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Pendidikan menurut Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-3	16	3
2	S-2	39	23
3	S-1	33	23
4	D-IV	2	3
5	D-III	5	1
6	D-II	0	0
7	D-I	0	0
8	SLTA	24	4
9	SLTP	2	0
10	SD	2	0
	Total	123	57

Sumber : Data E-Master BPSDM Prov.Jatim, Januari 2022

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai BPSDM Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Pendidikan menurut Jenis Kelamin



Sumber : Data E-Master BPSDM Prov.Jatim, Januari 2022

Pelaksanaan pelatihan dibiayai dengan dana yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur maupun dari Dana Retribusi Layanan Pendidikan untuk penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi kompetensi, analisis kebutuhan diklat dan evaluasi dampak diklat.

Layanan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

1. **Pelatihan Kepemimpinan**, yaitu:
 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
 - Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
2. **Pelatihan Dasar dan Diklat Pra Jabatan**, yaitu:
 - Pelatihan Dasar (Latsar) untuk CPNS
 - Diklat Prajabatan Gol. I dan II K1 / K2
 - Diklat Prajabatan Gol. III K1/K2
3. **Pelatihan Teknis**
4. **Pelatihan Fungsional dan Sosial Kultural**
5. **Sertifikasi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu)**

C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelaksanaan sebuah program dan kegiatan karena dampaknya yang signifikan serta untuk menentukan tujuan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Memaksimalkan penerapan ISO 9001:2015 dalam rangka memenuhi tuntutan akan pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas dan berstandar;
2. Optimalisasi LSP PDN dalam rangka pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi aparatur;
3. Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan baru dalam melaksanakan pelatihan guna mendukung akreditasi pelatihan yang berkelanjutan;
4. Tingkatkan kualitas SDM aparatur dan Widyaiswara dalam menyongsong penerapan Jawa Timur *Corporate University*;

5. Tingkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pengembangan kompetensi guna mendukung pengembangan kompetensi yang modern dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dalam era Revolusi Industri 4.0;
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang dinamis dan transparan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam rangka meningkatkan daya saing;
7. Peningkatan kualitas perencanaan pengembangan kompetensi dalam rangka mengakomodir kebutuhan stakeholder dan menangkap isu yang berkembang dimasyarakat;
8. Pengembangan pelaksanaan program pengembangan kompetensi dalam bentuk kontribusi dan pola kemitraan / fasilitasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari APBD.

D. CASCADING KINERJA

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan target organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Melalui cascading kinerja maka dapat diketahui keterhubungan antara indikator kinerja dengan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disebutkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih periode Tahun 2019-2024 adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”.

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam beberapa misi utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil Negara sehingga Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih periode Tahun 2019-2024 yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur adalah misi ke-3 yakni : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan.

Misi tersebut diatas kemudian diimplementasikan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Jawa Timur melalui penetapan Sasaran yaitu :

Sasaran :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah

Indikator : Indeks profesionalitas ASN

Target : 85,20

Pencapaian Sasaran diatas diukur melalui penetapan Tujuan yang kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional

Indikator : Nilai SAKIP

Target : 81,59

Program Pelaksana : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2. Tujuan : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan

Indikator :

a. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2

b. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2

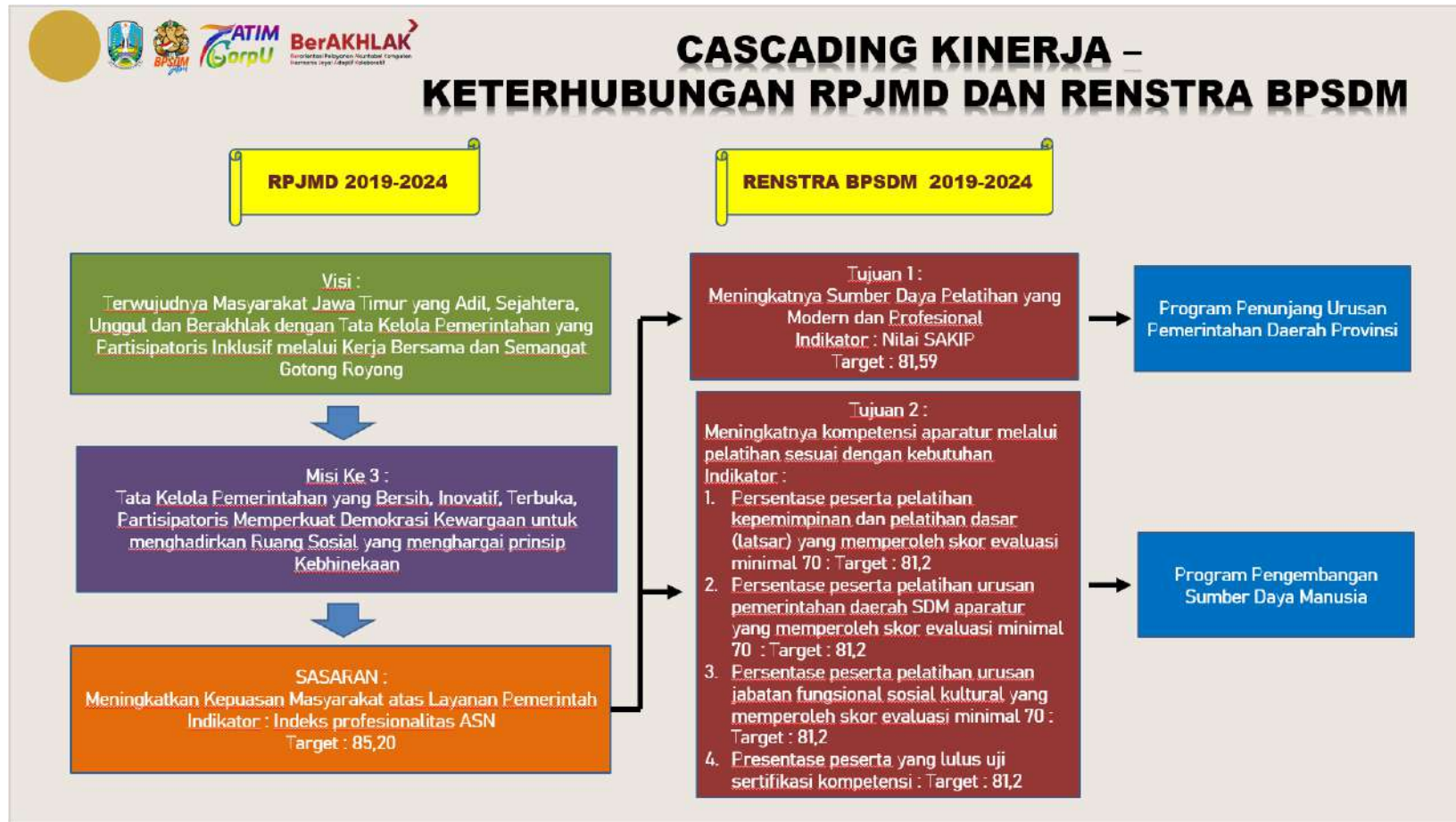
c. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2

d. Presentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi : Target : 81,2

Program Pelaksana : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun cascading kinerja disajikan dalam Gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2
Cascading Kinerja



E. PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis ini merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

1. Dasar Hukum Peta Proses Bisnis

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

- Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 113, Seri E);
 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/354/KPTS/013/2021 tentang Peta Proses Bisnis Provinsi Jawa Timur;

2. Komponen Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis

1. Komponen Proses Bisnis

- **SUPPLIER**
 - LAN RI
 - BPSDM Kemendagri
 - BKD Provinsi
 - BKD/BPSDM Kabupaten/ Kota
 - BKD/BPSDM se Indonesia
 - Lembaga Swasta/Profesional dalam bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia (John Robert Powers, Rumah Perubahan, Markplus Institute, dll)
- **INPUT**
 - SDM
 - Dana
 - Sarana dan Prasarana
 - Fasilitator

- **PROSES**
 - Perencanaan Diklat
 - Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
 - Evaluasi Diklat
- **OUTPUT**
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Laporan AKD
 - Laporan Evaluasi Dampak Diklat
- **CUSTOMER**
 - Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota
 - Pemerintah Pusat (Kementerian / Lembaga)

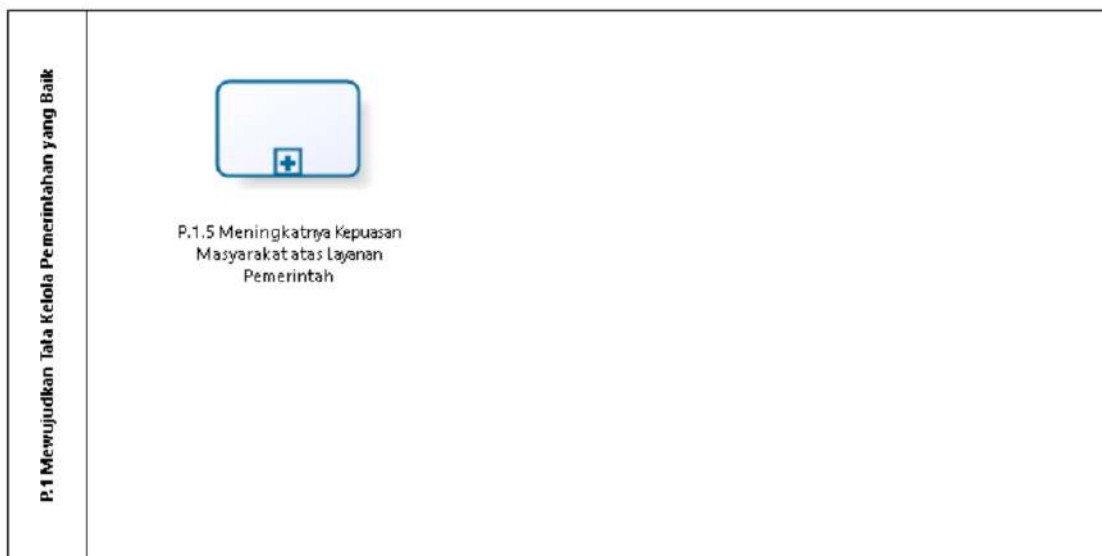
2. Peta Proses Bisnis

Adapun peta proses bisnis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dalam gambar 1.3 berikut ini :

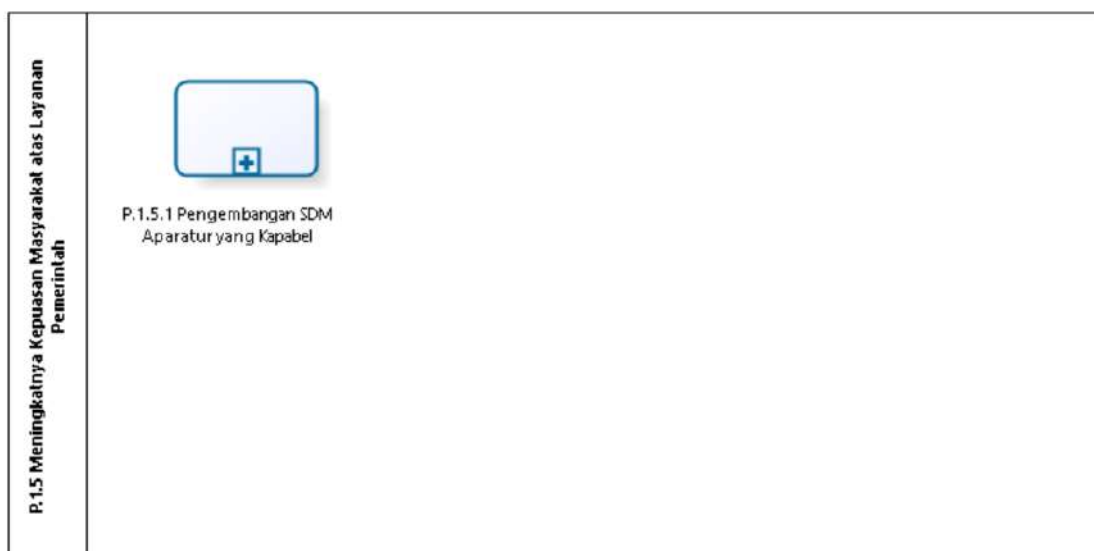
PETA PROSES BISNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis


Level 0




Level 1






Level 2

P.1.5.1 Pengembangan SDM Aparatur yang Kapabel	 <p>P.1.5.1.1 Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN</p>
--	---




Level 3

P.1.5.1.1 Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN	 <p>P.1.5.1.1.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi</p>
--	--

Level 4

P.1.5.1.1.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>P.1.5.1.1.1.1 Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Teknis / Fungsional</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>P.1.5.1.1.1.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>P.1.5.1.1.1.3 Penyelenggaraan Pelatihan Dasar</p> </div>
--	--

Level 5

P.1.5.1.1.1 Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Teknis / Fungsional	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>P.1.5.1.1.1.1.1 SOP Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Teknis / Fungsional</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>P.1.5.1.1.1.1.3 SOP Penyelenggaraan Latsar dan Prajabatan</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>P.1.5.1.1.1.1.2 SOP Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan</p> </div>
---	--

F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 700/25693/031.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021, bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 82,62 atau predikat A dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
a	Perencanaan Kinerja	30%	26,1	24,83
b	Pengukuran Kinerja	25%	20,63	20,31
c	Pelaporan Kinerja	15%	12,31	12,12
d	Evaluasi Kinerja	10%	7,06	6,85
e	Pencapaian Kinerja	20%	15,5	18,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	81,60	82,62
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Penilaian tersebut diatas menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Adapun uraian secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Secara umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indicator kinerja keseluruhan ASN di semua level. Hal yang perlu

diperhatikan adalah ketercukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya kinerja;

3. Implementasi Akuntabilitas Kinerja sebagai salah satu budaya kinerja masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara merata pada seluruh instansi.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagai upaya keberlanjutan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Perlu dilakukan pemetaan Kembali atas ukuran kinerja yang digunakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan dengan baik output/outcome yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing levelnya;
3. Penyusunan cascading kinerja agar lebih komprehensif terkait bagaimana dampak atas pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian sasaran dan menjaga keselarasan antara IKU sampai dengan IKI serta Menyusun penganggaran berbasis kinerja;
4. Memperkecil kemungkinan deviasi pada pencapaian kinerja, agar memperhatikan keselarasan cascading kinerja dengan peta proses bisnis dan kemungkinan adanya intervensi capaian kinerja dari pihak-pihak terkait;
5. Monitoring dan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja agar dapat dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meminimalisir kesenjangan pemahaman manajemen kinerja;
6. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala untuk mendeteksi lebih awal upaya pencapaian kinerja dan dapat dikembangkan dengan aplikasi;
7. Berupaya untuk menciptakan inovasi perbaikan atas implementasi SAKIP;

8. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan capaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini maka terjadi kesepakatan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

- tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan menganut dokumen anggaran pada tahun bersangkutan dengan memperhatikan penetapan target pada dokumen Renstra maupun Renja pada tahun bersangkutan. Pada Tahun Anggaran 2021, di Pemerintah Provinsi Jawa Timur terjadi refocusing anggaran yang dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga terjadi perubahan anggaran yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan demikian Perjanjian Kinerja Kepala BPSDM Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar (Latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		2. Persentase Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		3. Persentase peserta pelatihan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
2.	Meningkatnya sumberdaya pelatihan yang modern dan profesional	1. Nilai SAKIP	81,59

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 75.320.572.600,- dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 50.093.932.930,- sehingga total pagu anggaran sebesar Rp. 134.414.505.530,- yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
PERBANDINGAN STRUKTUR ANGGARAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program/Kegiatan	MURNI (Rp.)	P-APBD (Rp.)	Berkurang/ Bertambah
PENDAPATAN DAERAH	48.247.480.000	47.889.980.000	357,500,000
BELANJA DAERAH	156.246.477.000	134.414.505.530	21,831,971,470
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	72.678.421.000	59.093.932.930	13,584,488,070
Pengembangan Kompetensi Teknis	5.766.941.000	4.306.859.930	1,460,081,070
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	66.911.480.000	54.787.073.000	12,124,407,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83.568.056.000	75.320.572.600	8,247,483,400
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	980.400.600	774.743.712	205,656,888
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.913.861.588	47.955.217.588	4,958,644,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	233.431.000	112.946.000	120,485,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.489.300.000	1.115.316.000	373,984,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.648.240.000	3.107.559.700	(459,319,700)

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.876.245.000	3.457.145.000	(580,900,000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.879.027.812	11.145.369.600	1,733,658,212
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.547.550.000	7.652.275.000	1,895,275,000

Dengan adanya Perjanjian Kinerja diatas maka ditindaklanjuti dengan penetapan Perjanjian Kinerja pada setiap unit dilingkungan BPSDM Provinsi Jawa Timur dengan perbandingan matriks kinerja sebagai berikut :

1. Sekretariat

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Sekretariat pada awal tahun anggaran 2021 (murni) dan akhir tahun anggaran 2021 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
SEKRETARIAT**

Uraian	Murni Tahun 2021 (Rp.)	P-PAPB Tahun 2021 (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
Anggaran	83.568.056.000,-	75.320.572.600,-
Target indikator kinerja		
Persentase indikator program yang tercapai	100 %	100 %
Persentase realisasi anggaran	90,50 %	85,1 %
Indeks profesionalitas ASN	86,5	81

2. Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial pada awal tahun anggaran 2021 (murni) dan akhir tahun anggaran 2021 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial**

Uraian	Murni Tahun 2021 (Rp.)	P-PAPB Tahun 2021 (Rp.)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Anggaran	60.672.480.000,-	50.118.926.000.,
Target indikator kinerja		
Persentase alumni pelatihan kepemimpinan PNS dan pelatihan dasar CPNS	92%	92%

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada perubahan target alumni pelatihan dengan rincian :

- Pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur dari 2.417 orang menjadi 1.970 orang
- Pembiayaan pola kontribusi dan kemitraan dari 8.990 orang menjadi 10.142 orang.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- o untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- o Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Jawa Timur pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BPKAD Provinsi Jawa Timur).
- o Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari mekanisme pembiayaan retribusi daerah maka dilakukan inventarisasi usulan pengiriman peserta pelatihan dari instansi pengirim. Pada umumnya terjadi penurunan jumlah usulan yang berdampak pada penurunan target PAD BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 secara keseluruhan.

3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada awal tahun anggaran 2021 (murni) dan akhir tahun anggaran 2020 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis**

Uraian	Murni Tahun 2021 (Rp.)	P-PAPB Tahun 2021 (Rp.)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Anggaran	4.475.000.000,-	3.724.065.930.,
Target indikator kinerja		
Persentase alumni pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur	81%	81%

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada perubahan target jumlah alumni pelatihan sebagai berikut :

- Pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur tidak ada perubahan target peserta dari 450 orang tetap menjadi 450 orang.
- Pembiayaan mekanisme retribusi daerah dari 789 Orang berubah menjadi 971 orang.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan pada kegiatan yang belum dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Jawa Timur pada umumnya

langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BPKAD Provinsi Jawa Timur).

- o Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari mekanisme pembiayaan retribusi daerah maka dilakukan inventarisasi usulan pengiriman peserta pelatihan dari instansi pengirim. Pada umumnya terjadi penurunan jumlah usulan yang berdampak pada penurunan target PAD BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 secara keseluruhan.

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural pada awal tahun anggaran 2021 (murni) dan akhir tahun anggaran 2021 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural**

Uraian	Murni Tahun 2021 (Rp.)	P-PAPB Tahun 2021 (Rp.)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Anggaran	3.200.000.000,-	2.318.000.000,-
Target indikator kinerja		
Persentase alumni pelatihan jabatan fungsional dan sosial kultural SDM aparatur	81 %	81 %

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada pengurangan target jumlah alumni pelatihan sebagai berikut :

- Pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur dari 155 orang menjadi 284 orang
- Pembiayaan mekanisme retribusi daerah dari 1200 orang berubah menjadi 280 orang.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan pada kegiatan yang belum dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Jawa Timur pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BPKAD Provinsi Jawa Timur).
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari mekanisme pembiayaan retribusi daerah maka dilakukan inventarisasi usulan pengiriman peserta pelatihan dari instansi pengirim. Pada umumnya terjadi penurunan jumlah usulan yang berdampak pada penurunan target PAD BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 secara keseluruhan.

5. Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi pada awal tahun anggaran 2021 (murni) dan akhir tahun anggaran 2021 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi**

Uraian	Murni Tahun 2021 (Rp.)	P-PAPB Tahun 2021 (Rp.)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Anggaran	3.495.320.000,-	2.932.941.000,-
Target indikator kinerja		
Persentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	100%	100%

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada pengurangan jumlah dokumen manajemen pengajaran dan peserta sertifikasi kompetensi dengan rincian sebagai berikut :

- o Untuk penyusunan dokumen manajemen pengajaran (baik untuk pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur maupun mekanisme retribusi pelayanan Pendidikan) dari awal target sebesar 16 dokumen menjadi 21 dokumen.
- o Untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi (baik untuk pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur maupun mekanisme retribusi pelayanan pendidikan) dari awal target sebesar 261 orang turun menjadi 160 orang.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Jawa Timur pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BPKAD Provinsi Jawa Timur).
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari mekanisme pembiayaan retribusi daerah maka dilakukan inventarisasi usulan kegiatan AKD, EDD dan Sertifikasi dari berbagai instansi kediklatan yang masuk. Pada umumnya terjadi penurunan jumlah usulan yang berdampak pada penurunan target PAD BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 secara keseluruhan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, melalui langkah-langkah yakni :

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
- Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2021)**

Adapun hasil capaian kinerja dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur :

1) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS

Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang dibutuhkan. Adapun realisasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai berikut :

NO	JENIS DIKLAT	TARGET (Orang)	REALISASI		
			L	P	TOTAL
I.	Program Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS				
	APBD				
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	40	30	10	40
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	80	57	23	80
3	Pelatihan Dasar CPNS	1.850	730	1.114	1.844
	PAD (Kontribusi Pelayanan Pendidikan)				
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	120	102	13	115
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	160	118	42	160
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	120	69	46	115
4	Pelatihan Dasar CPNS	5.890	1.904	3.983	5.887
	PAD (Pola Kemitraan)				
1	Pelatihan Kepemimpinan	450	337	108	445

	Administrator				
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	262	123	139	262
3	Pelatihan Dasar CPNS	3200	1031	2184	3197

2) Penyelenggaraan Pelatihan Teknis

Pelatihan Kompetensi Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Adapun realisasi Pelatihan Kompetensi Teknis sebagai berikut :

NO	JENIS DIKLAT	TARGET PESERTA	REALISASI		
			L	P	TOTAL
	APBD				
1	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kepala Desa Angkatan I	60	56	3	59
2	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kepala Desa Angkatan II	60	55	4	59
3	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kepala Desa Angkatan III	60	56	4	60
4	Diklat Keprotokolan dan MC	30	4	26	30
5	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	30	28	2	30
6	Diklat Perubahan Mindset dan Pengembangan Kepribadian Pelayanan (In House Training) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya	30	10	20	30
7	Diklat Perubahan Mindset dan Pengembangan Kepribadian Pelayanan (In House Training) di RSU Haji Surabaya	30	18	12	30
8	Diklat Perubahan Mindset dan Pengembangan Kepribadian Pelayanan (In House Training) di RSU Menur Surabaya	30	15	15	30

9	Diklat Peningkatan Kapasitas Pengelola Kediklatan	30	18	12	30
10	Diklat Pengembangan Desa Wisata	30	22	8	30
11	Diklat Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Produk Makanan dan Minuman Ringan	30	17	13	30
12	Diklat Tata Kelola Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	30	27	3	30
	TOTAL (APBD)	450	326	122	448

NO	JENIS DIKLAT	TARGET PESERTA	REALISASI		
			L	P	TOTAL
	PAD				
1	Diklat Konvensi Hak Anak Bidang Gugus Tugas Kota Surabaya	45	36	9	45
2	Diklat Konvensi Hak Anak Bidang Kesehatan Kota Surabaya	45	41	4	45
3	Diklat dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Blitar	40	20	20	40
4	Diklat Operasional Pemeliharaan Sumber Daya Air Bagi Aparatur Pemerintah Kab. Banyuwangi	40	37	3	40
5	Diklat Fasilitator Gender Angkatan I Kota Surabaya	36	19	17	36
6	Diklat Fasilitator Gender Angkatan II Kota Surabaya	36	13	23	36
7	Diklat Penanggulangan Penyakit Menular	25	3	22	25
8	Diklat Pelayanan Publik Kabupaten Jombang	40	18	22	40
9	Diklat dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Blitar	40	23	17	40
10	Diklat Peningkatan Kapasitas ASN Kelurahan Kota Madiun	30	17	13	30
11	Diklat Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bondowoso	30	18	12	30

12	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Malang Angkatan I	40	18	22	40
13	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Mojokerto Angkatan I	40	30	10	40
14	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Mojokerto	40	22	18	40
15	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Malang Angkatan II	40	19	21	40
16	Diklat Anjab dan ABK Pemerintah Kabupaten Bondowoso	30	10	20	30
17	Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Probolinggo	34	15	19	34
18	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo	60	34	26	60
TOTAL (PAD)		691	393	298	691
TOTAL (APBD DAN PAD)		1.141	719	420	1.139

3) Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan Sosial Kultural

Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing serta dalam rangka meningkatkan Kompetensi Tenaga Kediklatan serta peningkatan kompetensi Sosial Kultural.

Adapun realisasi Pelatihan Fungsional dan Sosial Kultural sebagai berikut :

NO	JENIS DIKLAT	TARGET PESERTA	REALISASI		
			L	P	TOTAL
	APBD				
1	Rapat Koordinasi Teknis Jabatan Fungsional Satpol PP	76	55	21	76
2	Rapat Inventarisasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	110	66	44	110
3	Diklat Dasar Satpol PP	30	26	4	30
4	Diklat Pengawas Bibit Ternak	30	15	14	29
5	Diklat Handling Obat	30	4	26	30
6	Diklat Distric Food Inspector (DFI)	38	7	19	26
TOTAL		314	173	128	301
	PAD (Pola Kemitraan)				
1	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian	40	20	20	40
2	Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	40	22	17	39
3	Diklat Budaya Kerja	50	22	28	50
4	Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	40	14	26	40
5	Diklat Service Excellent	30	9	21	30
6	Diklat Pelayanan Publik Bagi ASN	40	24	16	40
7	Diklat Kinerja dan Kedisiplinan PNS	40	24	16	40
TOTAL		280	135	144	279

4) Sertifikasi

NO	URAIAN	TARGET PESERTA	REALISASI		
			L	P	TOTAL
1	Sertifikasi Kompetensi Camat	80	65	6	71
2	Sertifikasi Kompetensi Pengawas	30	18	12	30
3	Uji Sertifikasi Barang dan Jasa	20	12	7	19
4	Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	30	28	1	29
	TOTAL	160	123	26	149

Berdasarkan hasil capaian penyelenggaraan pelatihan di atas, maka realisasi dan capaian kinerja TA. 2021 berdasarkan indikator kinerja pada tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional	Nilai SAKIP	81.59	82,62	101,26
Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	100 %	123,30
	2. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	90,83 %	112,00
	3. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional sosial kultural yang	81,1 %	100 %	123,30

	memperoleh skor evaluasi minimal 70			
	4. Presentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi	81,1 %	100 %	110,89
Rerata				114,15

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Adapun rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 berdasarkan indikator kinerja pada sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
BPSDM Provinsi Jawa Timur

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Indeks Profesionalitas ASN	85,1 %	85 %	85,1 %
Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional	Nilai SAKIP	81.59	81,60	82,62
Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	99,99 %	100 %
	2. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor	81,1 %	100 %	90,83 %

	evaluasi minimal 70			
	3. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	100 %	100 %
	4. Persentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi	81,1	-	89,93 %

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Adapun rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan target akhir pada Renstra serta tingkat kemajuan berdasarkan indikator kinerja pada sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Akhir RENSTRA dengan Target RENSTRA

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (2021)	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat ata Layanan Pemerintah	Indeks Profesionalitas ASN	85,1 %	85,1 %	101,26 %
	Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional	Nilai SAKIP	81.59	82,62	123,30 %
	Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan	1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	100 %	112,00 %

kebutuhan	2. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	90,83 %	123,30 %
	3. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %	100 %	110,89 %
	4. Persentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi	81,1 %	89,93 %	101,26 %

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada)

Tidak adanya standar nasional untuk penetapan target kinerja dibidang pengembangan kompetensi sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan baik itu dengan instansi baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengembangan kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan diklat aparatur yang dalam pelaksanaannya mencakup aspek program, SDM dan sarana prasarana.

Secara umum, pelaksanaan program kegiatan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah sampai dengan 31 Desember tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan capaian pada kedua sasaran strategis

yaitu **Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional** didapatkan capaian kinerja tahun 2021 rerata sebesar **114,15 %**.

Untuk realisasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021 sebesar Rp. 109988461036.97 dari pagu P-APBD 2021 sebesar Rp. 134.414.505.530,00 atau 81,83 %.

Dari hasil tersebut secara umum untuk penyerapan anggaran belum optimal dengan analisis serapan sebagai berikut :

1. Analisis serapan belanja daerah

Dari target realisasi belanja sebesar 85,1% didapatkan realisasi belanja sebesar 81,83% atau capaian sebesar 96,15%. Hal ini disebabkan Perubahan pola diklat (klasikal ke daring) dan pemberlakuan PPKM menyebabkan sebagian alokasi anggaran belanja pelaksanaan pelatihan tidak terserap secara maksimal antara lain belanja makanan minuman kegiatan/pelatihan, perjalanan dinas, honorarium narasumber dan obat-obatan)

Adapun solusi yang dilakukan yaitu :

- a. Dengan mendesain kembali perencanaan penganggaran pelatihan sesuai dengan kondisi perkembangan pandemic
- b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi agar lebih mampu menjawab tuntutan perubahan dan tetap mempertahankan serta meningkatkan daya saing yang telah dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu institusi / lembaga yang telah diakui keberadaannya secara nasional dalam pengembangan bidang kompetensi aparatur.

2. Analisis realisasi target PAD

Untuk realisasi target PAD sebesar 87,33% yang mana hal ini

sangat dipengaruhi kemampuan instansi pengirim yang pada umumnya terkena refocusing anggaran.

Adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi usulan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Kab/Kota secara periodik serta melakukan koordinasi secara intensif dengan institusi terkait mengenai kebutuhan diklat sesuai substansi (kompetensi) yang dibutuhkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya hal yang diukur yaitu :

- **Alokasi Berdasarkan Sasaran Pembangunan**

Berdasarkan alokasi sasaran pembangunan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional”, alokasi anggaran sebesar Rp. 75.320.572.600,- dan “Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan” alokasi anggaran sebesar Rp. 59.093.932.930,- dari total anggaran sebesar Rp. 134.414.505.530,- atau sebesar 43,96 %.

- **Pencapaian Kinerja Dan Anggaran**

Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan anggaran dikalikan 100%. Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2021 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Sasaran yakni “**Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional dan Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan**” yang di bagi menjadi 2 (dua) program yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 75.320.572.600,- realisasi Rp. 70.740.073.632,97,- dengan capaian kinerja 93.92% ;
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran Rp. 59.093.932.930,- realisasi Rp. 39.248.387.404,- dengan capaian 66,42%.

Dari capaian kerja tersebut didapatkan rerata sebesar 80,69 %.

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diukur berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan	
$\frac{\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Penyerapan Anggaran}}{\% \text{ Penyerapan Anggaran}}$	$\times 100\%$

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran / Program	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Persentase indikator program yang tercapai	100,00	94,82	5,46
	2. Persentase realisasi anggaran	96,82		2,11
	3. Indeks profesionalitas ASN	100,00		5,46
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	105,49	66,56	58,49
	2. Prosentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	115,94		74,19

	3. Prosentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	113,22		70,10
	4. Prosentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	100,00		50,24
RERATA		104,4	80,69	29,65

Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap program dan indikatornya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 3 indikatornya yaitu Persentase indikator program yang tercapai, Persentase realisasi anggaran, dan Indeks profesionalitas ASN yaitu sebesar 5,46 %, 2,11 % dan 5,46%.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 4 indikatornya yaitu Persentase alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS, Prosentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur, Prosentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur, dan Prosentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun yaitu sebesar 58,49 %, 74,19 %, 70,10 % dan 50,24 %.

Secara umum sasaran strategis **Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan Meningkatkan Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional** dengan capaian kinerja sebesar 104,4 % dan capaian anggaran sebesar 80,69 % maka yang dicapai efisiensinya sebesar 29,65 %. Adanya efisiensi ini ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelolaan

anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Hasil analisis keberhasilan pencapaian kinerja pada tiap program-program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi capaian anggaran sebesar Rp. 70.740.073.632.97,- atau 93,92% dengan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan	Plafon	Realisasi	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	774.743.712,00	726.960.689,00	93,83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.955.217.588,00	45.435.823.510,00	94,75
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	112.946.000,00	110.330.980,00	97,68
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.115.316.000,00	1.067.069.059,00	95,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.107.559.700,00	2.978.389.821,00	95,84
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.457.145.000,00	3.382.305.671,40	97,84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.145.369.600,00	10.002.057.307,00	89,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.652.275.000,00	7.634.622.501,00	99,77

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah upaya dari seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen dan berkewajiban untuk selalu menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Jawa Timur sesuai kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA).

- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia capaian anggaran sebesar Rp. 39.248.387.404,- atau 66,42% dengan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan	Plafon	Realisasi	%
Pengembangan Kompetensi Teknis	4.306.859.930,00	3.851.683.329,00	89,43
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	54.787.073.000,00	35.396.704.075,00	64,61

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini khususnya pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional kurang menunjang keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan.

Belum optimalnya dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia disebabkan sebagian besar karena adanya COVID 19 sehingga setiap kegiatan dan program yang telah direncanakan mengalami banyak kendala terkait dengan di terapkannya PSBB/PPKM dan perketatan penerapan protokol Kesehatan. Selain itu beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur yang rencananya mengirimkan

peserta diklat kepemimpinan maupun diklat prajabatan/latsar tidak jadi mengirimkan dikarenakan terbatasnya anggaran akibat refocusing anggaran yang di gunakan untuk penanganan dan pengendalian virus corona atau COVID 19.

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2019-2024 yang mana pada tahun ini BPSDM Provinsi sebesar Rp. 134.414.505.530,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 75.320.572.600,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 59.093.932.930,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Adapun Penyerapan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.5
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR

Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	59,093,932,930.00	39,248,387,404.00	66.42
Pengembangan Kompetensi Teknis	4,306,859,930.00	3,851,683,329.00	89.43
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	54,787,073,000.00	35,396,704,075.00	64.61
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75,320,572,600.00	70,740,073,632.97	93.92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	774,743,712.00	726,960,689.00	93.83

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47,955,217,588.00	45,435,823,510.00	94.75
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	112,946,000.00	110,330,980.00	97.68
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,115,316,000.00	1,067,069,059.00	95.67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,107,559,700.00	2,978,389,821.00	95.84
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,457,145,000.00	3,382,305,671.40	97.84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,145,369,600.00	10,002,057,307.00	89.74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.652.275.000,00	7.634.622.501,00	99,77
TOTAL BELANJA	134,414,505,530.00	109,988,461,036.97	81.83

Tabel 3.6
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021
BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2020

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan/uji sertifikasi sesuai dengan kebutuhan							
Program Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	Persentase Alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	91%	100%	109,89%	19.970.400.000,-	13.086.981.419,-	65,53
Program Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	Persentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	80,5%	100%	124,22%	8.293.351.000,-	7.926.072.240,-	95,57
Program Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	Persentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	80,5%	100%	124,22%	1.451.358.480,-	1.180.734.276,-	81,35
Program Manajemen Pengajaran dan Sertifikasi	Persentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi	100%	100%	100%	1.246.652.000,-	1.102.201.950,-	88,41

Kompetensi	yang tersusun						
Sasaran 2 :Meningkatnya sumberdaya pelatihan yang modern dan profesional							
Program Pelayanan Kesekretariatan	1. Persentase indikator program	100 %	100%	100%	450.000.000,-	439.626.041,-	97,69
	2. Persentase realisasi anggaran	90 %	90,24%	100,26%	3.528.000.000,-	3.477.283.357,-	98,56
	3. Indeks profesionalitas ASN	86,5%	00%	00%	30.465.074.797,-	28.118.298.182,81,-	92,30

TAHUN 2021

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Persentase indikator program yang tercapai	100	100	100,00	75.320.572.600,-	71.416.645.486,-	94,82
	2. Persentase realisasi anggaran	85,1	82,39	96,82			
	3. Indeks profesionalitas ASN	81	81	100,00			
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	92	97,16	105,49	59.093.932.930,-	39.333.353.852,-	66,56
	2. Prosentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	81,10	94,03	115,94			
	3. Prosentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	81,10	91,82	113,22			
	4. Prosentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	100	100,00	100,00			

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Salah satu upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah dengan mempedomani hasil rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya keberlanjutan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi ke Bidang-Bidang maupun Sub Bagian di Sekretariat terkait pelaksanaan manajemen kinerja pada unit kerja bersangkutan;
2. Perlu dilakukan pemetaan Kembali atas ukuran kinerja yang digunakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan dengan output / outcome yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing levelnya yang mana hal ini dilakukan dengan melakukan proses cek and re-check dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sehingga didapatkan kesepakatan terhadap penetapan kinerja yang dilakukan;
3. Penyusunan cascading kinerja agar lebih komprehensif terkait bagaimana dampak atas pelaksanaan program / kegiatan terhadap capaian sasaran dan menjaga keselarasan antara IKU sampai dengan IKI serta Menyusun penganggaran berbasis kinerja yang mana hal ini dilakukan dengan mereview pelaksanaan penyusunan cascading kinerja dengan mengakomodir kebutuhan yang timbul dilapangan;
4. Memperkecil kemungkinan deviasi pada pencapaian kinerja, agar memperhatikan keselarasan cascading kinerja dengan peta proses bisnis dan kemungkinan adanya intervensi capaian kinerja dari

pihak-pihak terkait yang mana hal ini ditindaklanjuti dengan mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap data capaian kinerja baik diberikan oleh Bidang maupun Sekretariat sehingga apabila ditemukan deviasi dapat segera direvisi;

5. Monitoring dan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja agar dapat dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meminimalisir kesenjangan pemahaman manajemen kinerja yang mana hal ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan baik dalam bentuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi maupun melalui grup *WhatsApp* sehingga koordinasi dapat terus dilakukan;
6. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala untuk mendeteksi lebih awal upaya pencapaian kinerja dan dapat dikembangkan dengan aplikasi yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan pembuatan aplikasi DIMPLE (*Digital Management of Performance Planning and Evaluation*) yang mulai diterapkan implementasinya sejak triwulan IV Tahun 2021;
7. Berupaya untuk menciptakan inovasi perbaikan atas implementasi SAKIP yang mana hal ini dilakukan dengan mendorong tiap Unit Kerja dilingkungan BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk menciptakan inovasi sesuai bidang tugas yang dimiliki;
8. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan memasukkan agenda implementasi SAKIP dalam pelaksanaan rapat khususnya dilingkungan pejabat struktural BPSDM Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang mengacu pada dokumen Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dan alokasi sumber daya keuangan (anggaran) yang digunakan. Kontrak Kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan atau pengembangan aparatur sipil negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adanya pandemi yang melanda telah memaksa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya pengembangan kompetensi aparatur. Untuk itu BPSDM Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan metode yang sesuai dengan perubahan situasi yang ada. Hal ini diwujudkan dalam bentuk diversifikasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yaitu dalam bentuk klasikal, non klasikal maupun blended. Output dari penerapan ini adalah tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja khususnya yang dibiayai sepenuhnya oleh APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk kegiatan yang dibiayai oleh mekanisme Retribusi Pelayanan Pendidikan pada umumnya belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan berkurangnya anggaran pengiriman peserta dari instansi pengirim dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan covid.

Secara umum pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Tahun 2021 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Hal ini terbukti dengan capaian kinerja dalam Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2021 yang menyebutkan rerata capaian kinerja sebesar 104,4 % dan realisasi anggaran sebesar 81,83 %. Keberhasilan merealisasikan target

kinerja merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur untuk terus menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan perubahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas yang memiliki kompetensi, dedikasi dan integritas yang tinggi untuk keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Jawa Timur.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

1. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis pelatihan baru, kurikulum yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek;
3. Meningkatkan kompetensi SDM Kediklatan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
4. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarannya;
5. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan;
6. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/kota serta;
7. Mengembangkan *Corporate University (Corpu)* untuk pelatihan Non

Klasikal Aparatur Sipil Negara;

8. Mengembangkan proses pembelajaran berbasis IT untuk mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
9. Membuka jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kapasitas lembaga baik dengan Lembaga Pemerintah ataupun swasta dalam seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**FORM
PENDANAAN
INDIKATIF**

NAWA BHAkti	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	718.140.100	463.160.270	472.921.079	504.092.422
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.832.000	21.175.631	21.621.894	23.047.044
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.735.000	21.186.257	21.632.744	23.058.609
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34.152.500	21.945.387	22.407.872	23.884.828
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	49.230.500	30.771.796	31.420.292	33.491.278
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.864.000	17.416.547	17.783.590	18.955.748
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.433.000	37.148.925	37.931.815	40.431.991
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.997.656.000	52.678.855.950	53.789.029.437	57.334.391.129
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.252.199.676	1.292.093.634	1.319.323.689	1.406.283.422	

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.272.000	132.816.799	135.615.829	144.554.588
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	230.131.000	143.844.654	146.876.088	156.557.038
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44.251.000	24.096.516	24.604.334	26.226.064
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	56.160.000	33.834.256	34.547.291	36.824.385
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	62.452.000	71.999.521	73.516.865	78.362.535
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.739.912	9.287.700	9.483.432	10.108.508	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.811.000	6.988.746	7.136.029	7.606.382
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.730.000	16.045.800	16.383.956	17.463.861
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	42.372.000	54.007.923	55.146.106	58.780.915
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18.821.000	30.597.093	31.241.907	33.301.135
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.810.000	6.988.746	7.136.029	7.606.382
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.281.000	16.439.585	16.786.039	17.892.447

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	11.681.000	14.839.443	15.152.175	16.150.891
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20.000.000	12.501.111	12.764.564	13.605.906
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	337.005.000	43.753.887	44.675.972	47.620.671
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.851.000	42.641.913	43.540.564	46.410.426
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	51.283.000	55.608.065	56.779.970	60.522.471
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.531.000	11.039.106	11.271.748	12.014.695
				Pemindahan Tugas ASN	16.886.000	13.870.607	14.162.921	15.096.433
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.082.950.000	715.957.353	731.045.700	779.230.645
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28.416.000	17.761.578	18.135.892	19.331.271
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.416.000	17.761.578	18.135.892	19.331.271
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	197.195.000	96.932.263	99.396.536
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		70.115.000	45.297.774	46.252.396	49.301.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		234.170.000	146.369.253	149.453.892	159.304.750
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		574.795.000	351.578.108	358.987.393	382.649.099
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		140.413.212	90.194.326	92.830.288	98.948.951

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.640.000	75.406.699	76.995.847	82.070.825
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	20.918.000	21.914.000	22.910.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis	-	216.820.000	216.820.000	216.820.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	536.400.000	325.903.952	332.772.171	354.705.969
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	636.680.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	932.835.000	543.503.375	547.656.743	580.285.672
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	605.480.000	310.327.568	316.867.525	337.753.010
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	968.689.000	1.014.817.000	1.060.945.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	968.689.000	1.014.817.000	1.060.945.000
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	92.500.000	101.750.000	111.925.000
				Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	454.800.000	284.275.254	290.266.175	309.398.302
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	760.210.000	567.206.638	579.160.159	617.333.970
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.080.000	14.176.259	14.475.015
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.586.500.000	2.852.407.904	2.912.520.592	3.104.491.688

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	436.000.000	241.271.434	246.356.076	262.593.986
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.926.540.600	4.942.251.925	5.046.406.750	5.379.027.312
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.000.000	185.016.436	188.915.540	201.367.409
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.400.000	116.135.317	118.582.795	126.398.867
				Pemeliharaan Mebel	87.500.000	67.193.469	68.609.529	73.131.745
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	85.400.000	93.940.000	103.334.000
				Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	957.150.000	382.860.348	384.188.638	406.309.224
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.548.800.000	2.561.790.079	2.615.778.181	2.788.190.285
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.556.400.000	1.440.878.002	1.471.243.592	1.568.216.725
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.960.200.000	1.128.475.249	1.152.257.150	1.228.205.134

NAWA BHAkti	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	20.000.000	12.501.111	12.764.564	13.605.906
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	121.500.000	75.631.719	77.225.609	82.315.731
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	32.550.000.000	3.065.897.362	3.130.509.205	3.336.848.444

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	715.500.000	450.628.157	460.124.860	490.452.774
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	119.500.000	108.549.643	110.837.258	118.142.803
				Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	141.100.000	88.132.829	89.990.173	95.921.637
				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	843.500.000	522.546.421	533.558.755	568.726.870
				Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1.000.500.000	628.805.861	642.057.545	684.377.071

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
JATIM AMANAH	PELAYANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	455.000.000	284.400.265	290.393.820	309.534.361
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	133.700.000	75.631.719	77.225.609	82.315.731
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	61.890.500.000	39.179.928.092	40.005.620.227	42.642.484.939
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.450.400.000	935.395.597	955.108.466	1.018.061.916

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021 (MURNI)**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIES AGUNG PAEWAI**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR



[Handwritten signature]
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

ARIES AGUNG PAEWAI

Pembina Tingkat I

NIP. 19760417 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar (Latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		2. Persentase Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		3. Persentase peserta pelatihan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
2.	Meningkatnya sumberdaya pelatihan yang modern dan profesional	1. Nilai SAKIP	81,59

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 83.568.056.000,-	APBD
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 72.678.421.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 156.246.477.000,-	

Surabaya, Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR



[Signature]
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

[Signature]

ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Tingkat I
NIP. 19760417 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021 (P-APBD)**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIES AGUNG PAEWAI**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Oktober 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**


ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Utama Muda
NIP. 19760417 199511 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan	1. Persentase peserta pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar (Latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		2. Persentase Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
		3. Persentase peserta pelatihan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70	81,1 %
2.	Meningkatnya sumberdaya pelatihan yang modern dan profesional	1. Nilai SAKIP	81,59

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 75.320.572.600,-	APBD
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 50.093.932.930,-	APBD & PAD
Jumlah	Rp. 134.414.505.530,-	

Surabaya, Oktober 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR


KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA**


ARIES AGUNG PAEWAI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760417 199511 1 001

REKAPITULASI DATA

REKAPUTULASI ALUMNI KEGIATAN TAHUN 2021

BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET PESERTA	ALUMNI	%
PEMBIAYAAN APBD PROVINSI JAWA TIMUR				
1	Pelatihan Kepemimpinan	120	120	100.00
2	Pelatihan Dasar	1.850	1.844	99.68
3	Pelatihan Kompetensi Teknis	450	448	99.56
4	Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	314	301	95.86
5	Sertifikasi Kompetensi	130	105	80.77
PEMBIAYAAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN				
1	Pelatihan Kepemimpinan	1.112	1.097	98.65
2	Pelatihan Dasar	9.090	9.084	99.93
3	Pelatihan Kompetensi Teknis	691	691	100.00
4	Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	280	279	99.64
5	Sertifikasi Kompetensi	30	29	100.00

CAPAIAN PRESTASI KELEMBAGAAN TAHUN 2021**BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	URAIAN PRESTASI	PENYELENGGARA
1	Peringkat 1 Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2021 oleh LAN – RI	Lembaga Administrasi Negara
2	Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi Bintang 1 dan Terakreditasi “A” (Program)	Lembaga Administrasi Negara
3	Akreditasi “A” sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat Barang/Jasa	LKPP
4	Juara III Nasional sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat Manajemen Bencana	
5	Re Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015	
6	Predikat “A” (Memuaskan) untuk hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021	
7	Penghargaan PWI Awards Tahun 2021 sebagai lembaga penanganan Covid-19 (diluar dari tupoksi)	
8	KTI International Widyaiswara Terindex SCOPUS dan Web Scince 2020-2021	
9	Peringkat I Terbaik, Inovasi Pengembangan Micro Learning LAN RI Th. 2021	
10	TOP 30, KOVABLIK Tahun 2021, Aplikasi PAWON (Pelayanan Administrasi Widyaiswara Online)	

CASCADING KINERJA

CASCADING KINERJA – KETERHUBUNGAN RPJMD DAN RENSTRA BPSDM

RPJMD 2019-2024

RENSTRA BPSDM 2019-2024

Visi :
Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong

Misi Ke 3 :
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan

SASARAN :
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah
Indikator : Indeks profesionalitas ASN
Target : 85,20

Tujuan 1 :
Meningkatnya Sumber Daya Pelatihan yang Modern dan Profesional
Indikator : Nilai SAKIP
Target : 81,59

Tujuan 2 :
Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan
Indikator :

1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2
2. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2
3. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional sosial kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 81,2
4. Presentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi : Target : 81,2

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

